

**KONVERSI HAK MILIK ATAS TANAH ADAT
(HAK MILIK YANG TERKEKANG)
DI KECAMATAN SANGGAU LEDO
KABUPATEN BENGKAYANG
KALIMANTAN BARAT**



**Tesis
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2**

Magister Kenotariatan UNDIP

**Yulius Ageng Tri Haryanto, SH
B4B000214**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

UPT-PUSTAK-UNDIP

346.043
HAR
w e1

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	2130/T/mht/21
Sl.	800003

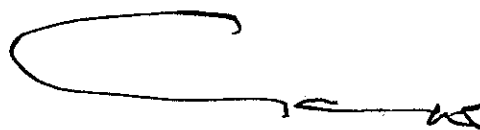
TESIS

**KONVERSI HAK MILIK ATAS TANAH ADAT
(HAK MILIK YANG TERKEKANG)
DI KECAMATAN SANGGAU LEDO KABUPATEN BENGKAYANG
KALIMANTAN BARAT**

Di susun oleh
Yulius Ageng Tri Haryanto, SH
B4B000214

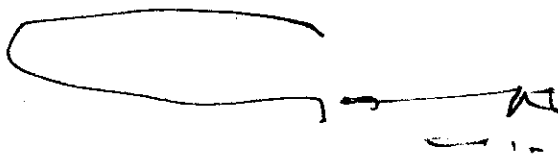
Telah dipertahankan di depan tim Penguji pada tanggal 21 Febuari 2003
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui:
Dosen Pembimbing Utama



(PROF. IGN. SUGANGGA, SH)

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



(PROF. IGN. SUGANGGA, SH)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupaun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar ini.

Semarang 21 Febuari 2003

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yulius Ageng Tri Haryanto', with a long horizontal flourish extending to the right.

Yulius Ageng Tri Haryanto, SH.

HALAMAN PERSEMBAHAN

RENUNGAN

Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janjimu ini: supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapa-bapa janganlah bangkitkan amarahmu di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka didalam ajaranmu dan nasihat Tuhan.

(Efesus 6:1-4)

Ku persembahkan tesis ini kepada:

*Kedua orang tua ku di Kalimantan Barat
Mas Anjar di Bandung,
Mbak Ambar dan Mas Kamto serta keponakanku Adjie, Kiki, Iyos
Aris di Yogyakarta
Agusta untuk doa dan kesetiaannya*

MOTTO

*Pengalaman merupakan kesempatan yang diberikan
untuk memperbaiki diri agar lebih
bijaksanana.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan Kurnianya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “ **Konversi Hak Milik Atas Tanah Adat (Hak Yang Terkekang) di Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat**” . Penulisan tesis ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh derajat strata - 2 pada Program Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam penulisan ini,, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, dorongan dan perhatian tidak ternilai dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala keikhlasan hati, penulis mengutarakan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. dr. Suharyo. Hadisaputro, SpPD selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. IGN. Sugangga, SH selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan selaku dosen Pembimbing pada penulisan tesis ini yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran.
4. Bapak Soeharto, SH, M.Hum, Bapak Sukirno, SH, Msi, Ibu Endang Sri Santi, SH, M.Hum serta Ibu Sri Sudyatni, SH, M.Hum. selaku tim penguji yang telah banyak memberi masukan demi perbaikan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu pada bagian Administrasi Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah memberi bantuan kepada penulis selama ini.
6. Bapak dan Ibu di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bengkayang yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama ini.

7. Bapak dan Ibu di Kantor Kecamatan Sanggau Ledo yang telah memberikan bantuan penulisan selama ini.
8. Bapak-Bapak pengurus Adat Dayak di Kecamatan Sanggau Ledo yang telah banyak memberi data mengenai keberadaan masyarakat adat di Sanggau Ledo.
9. Seluruh rekan-rekan seperjuangan Angkatan I Program studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Teman-temanku di Wisma Pangaredo Yogyakarta yang telah banyak membantu dan dorongan dalam penyelesaian tesis ini.
11. Rekan-Rekanku di Lembaga Bentang Alam Hijau (lemBAH) Bengkayang yang selalu memberikan dukungan selama ini.
12. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama ini hingga selesai penulisan tesis ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan ini masih terdapat banyak kekurangannya, untuk itu demi perbaikan tesis ini dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak.

Semarang, 21 Febuari 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAKSI	Vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Terhadap hak ulayat	13
2.1.1. Pengertian hak ulayat.....	13
2.1.2. Hak ulayat dalam UUPA.....	15
2.1.3. Ciri-ciri hak ulayat.....	20
2.1.4. Subyek dan obyek hak ulayat.....	24

2.1.5. Hak milik komunal dan hak milik perorangan.....	32
2.1.6. Pembukaan hutan untuk lahan oleh masyarakat dayak....	35
2.1.7. Program transmigrasi.....	38
2.2. Tinjauan Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA.....	44
2.3. Tinjauan Konversi Hak Atas Tanah	48
2.4. Tinjauan Tentang Pendaftaran Tanah.....	57

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan	63
3.2. Spesifikasi Penelitian	64
3.3. Lokasi Penelitian	64
3.4. Sumber Data	64
3.4.1. Data sekunder	64
3.4.2. Data primer	65
3.5. Populasi	66
3.6. Metode Penentuan Sampel	68
3.7. Nara Sumber	70
3.8. Metode Analisa Data	70
3.9. Jalannya Penelitian	71

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Bengkayang	74
4.1.1. Monografi Kecamatan Sanggau Ledo	74

4.1.2. Struktur tanah	77
4.1.3. Keadaan iklim/curah hujan.	80
4.1.4. Gunung dan sungai.	81
4.2. Identitas Responden.	82
4.3. Keberadaan Masyarakat Adat di Kecamatan Sanggau Ledo..	85
4.3.1. Keberadaan masyarakat adat dayak	85
4.3.2. Nilai dan jenis hukum adat... ..	88
4.3.3. Tata guna kawasan adat di Sanggau Ledo	90
4.4. Konversi Hak Milik Adat sesuai dengan UUPA.	94
4.4.1. Hak milik adat sebelum konversi.....	94
4.4.2. Hak milik adat sesudah konversi.....	102
4.5.3. Tata cara konversi.....	106
4.5. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Konversi Hak Milik Atas Tanah Adat.....	113
4.5.1. Kepemilikan tanah	113
4.5.2. Alasan mengkonversi hak milik adat	114
4.5.3. Alasan belum mengkonversi hak milik adat	117
4.6. Upaya-Upaya Pemerintah Agar Masyarakat Mau Mengkonversi Hak Milik Adat	125
4.6.1. Penyuluhan Hukum.....	125
4.6.2. Proyek Nasional Agraria (Prona).....	126

BAB V. PENUTUP.

5.1. Kesimpulan.....	127
5.2. Saran-Saran.....	128
5.2.1. Upaya pemerintah	128
5.2.2. Untuk anggota masyarakat	129
5.3. Ringkasan.....	130

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konversi hak milik atas tanah adat di Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat dilaksanakan dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Tujuannya konversi adalah penghapusan hak-hak feodal dan menjamin kepastian hukum pemilik tanahnya. Tanah milik adat ini adalah tanah dalam pengaturannya tunduk pada hukum adat. Tanah milik adat ini dimiliki kelompok masyarakat atau dikuasai perorangan bila hak komunalnya sudah lemah dan dikuasai secara turun-temurun sejak nenek moyangnya. Hak milik adat yang ada di Kecamatan Sanggau Ledo ini berupa tanah *parene'an* (*parenekan*), *tembawang*, hutan adat.

Oleh sebab itu mereka menganggap pemilikan tanah milik adat ini sudah kuat dan pasti, sehingga masyarakat merasa tidak membutuhkan bukti-bukti lainnya untuk memperkuat atau mengukuhkan kepemilikan tersebut. Mereka sudah begitu lama, bahkan telah berabad-abad mendudukinya dan memperoleh nafkah dari tanah itu. Dalam kurun waktu yang begitu lama tidak ada gangguan dari pihak lain.

Dengan Pemikiran seperti ini mereka tidak merasakan konversi hak milik adat. Bahkan hal itu hanya menambah beban terutama segi ekonomi dan waktu. Selanjutnya konversi hak milik adat bahkan mereka anggap sebagai penyimpangan terhadap norma pemilikan tanah mereka pegang selama ini yang mereka warisi dari nenek moyang mereka.

Prilaku seperti ini mudah dipahami sebab masyarakat adat yang menghuni tanah adat pada umumnya sekaligus masyarakat agraris, semata-mata hidup dari hasil pertanian dan peternakan tradisional. Selama ini mereka hampir tidak mengalami interaksi sosial menyangkut tanah dengan orang-orang dari luar masyarakat adatnya. Sekalipun akhir-akhir ini situasi mulai berubah. Jadi, mereka tidak merasakan ancaman akan kehilangan hak atas tanahnya, sehingga tidak dibutuhkan bukti-bukti formal. Bila ada perselisihan mengenai tanah, misalnya siapa pemegang hak atas tanah, cukuplah dibuktikan dengan alat-alat bukti setempat. Umpamanya, siapa yang membuka lahan yang menjadi perselisihan, siapa yang mengusahakannya selama ini, sekalipun ini menyulitkan bila persoalannya sampai ke pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa bahwa konversi hak milik atas tanah adat di Kecamatan Sanggau Ledo belum dilaksanakan sebagaimana sesuai dengan UUPA. Hal ini disebabkan ketidaktahuan pemilik tanah, kebijakan mengenai biaya, proses/prosedur, jangka waktunya dan pengaruh hukum adat setempat.

Kata kunci:

1. Konversi.
2. Hak milik.
3. Tanah adat.

ABSTRACT

The purpose of this research is to understand the conversion of property right upon customary land in Sanggau Ledo District, Bengkayang regency, Province of West Kalimantan. It is organized in term the issues of The Agrarian Principle Law No. 5 1960. This conversion's goal is removing all feudal rights and to ensure a certainty of law the owner of those lands. This customary lands are under individual authority if the communal right is weak and it under the descending authority from their ancient. The customary right of property in the district of Sanggau Ledo is a *parene'an* (*parenekan*), *tembawang*, custom forest.

Therefore, they deemed that the customary land possession is appropriate and certain. So people feel that they do not need any other evident to strengthened and to sturdy their possession. They are too long, even for centuries settled on it and making their basic necessities of life from the land. In the long periods of time, there are no disturbances from the other party.

Their way of thinking like that, they do not know anything about the conversion of customary land possession right advantages upon on their properties. Even it only give more burdens mainly for their economic and time. Then the conversion of customary land possession right even they deemed that it is a violence toward land possession norms of the land they are holding in as long as the present time, that they got from their ancient as legacy.

This behavior is easy to understand, because the customary society of the land generally a agrarian societies, merely they life depending on the farming and traditional cattle's yield. As far as now they almost isolated from the social interaction involving those land and people from the outside of their custom society. Although at the present time, the situation is began to change. So they feel there is no threatening that they are maybe loose their right of the land, so they do not any formal evidences. If there is a dispute about that land, for example who is the right of land holder, its quite enough by showing their local evident equipments. For instance, who is open those dispute area, who is exploit it so far, although it will be a matter of difficulty if the issues reached the court.

Base on the observation, that the conversion the customary land possession right in the Sanggau Ledo district, is not organized the conversion the customary land possession right, also cost factor, procedures, tome and the influences of local custom law.

Keyword:

1. Conversion.
2. Right of Property.
3. Customary lands

BAB I PENDAHULUAN

1. 1. LATAR BELAKANG MASALAH

Masyarakat adil dan merata hanya dapat dicapai melalui pembangunan yang dilandasi Pancasila dan UUD 45. Dalam kegiatan pembangunan tanah sebagai wadah kegiatan yang dilakukan, sehingga tanah merupakan salah satu sarana untuk pembangunan.

Sebelum keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria No 5 tahun 1960 tanggal 24 September 1960, Hukum Agraria di Indonesia masih bersifat dualistik, maksudnya bahwa Hukum Agraria di Indonesia waktu itu berlaku dua sistem hukum yaitu hukum yang tunduk pada hukum perdata barat dan hukum Adat. Berlakunya dua sistem hukum ini mengakibatkan timbulnya bermacam-macam Hak Atas Tanah. Hak Atas tanah yang tunduk pada hukum perdata barat seperti tanah hak eigendom, tanah hak erfpacht dan hak opstal. Sedangkan tanah yang tunduk pada hukum adat seperti hak ulayat, tanah hak andarbeni, tanah hak druwe desa, tanah hak pesini, tanah hak grant sultan, tanah hak usaha bekas partikelir dan hak-hak lain.¹

Hak ulayat ini dalam bentuk dasarnya adalah suatu hak dari persekutuan hukum adat atas tanah yang didiami, sedangkan pelaksanaannya dilakukan baik oleh persekutuan itu sendiri, maupun oleh kepala persekutuan atas nama persekutuan. Wilayah kekuasaan persekutuan adalah merupakan milik

¹ A.P Parlindungan, Konversi Hak-Hak Atas Tanah, Mandar Maju Bandung, 1990, hal. 45



persekutuan yang pada dasarnya bersifat tetap, artinya perpindahan hak milik atas wilayah ini tidak diperbolehkan. Dalam kenyataannya terdapat pengecualian-kecualian, oleh karenanya di atas tadi ditegaskan pada dasarnya bersifat tetap.

Hak perseorangan atas tanah dibatasi oleh hak ulayat sebagai seorang warga persekutuan, maka tiap individu mempunyai hak untuk:

- a. Mengumpulkan hasil-hasil hutan seperti rotan, kayu.
- b. Memburu binatang liar yang hidup diwilayah kekuasaan persekutuan.
- c. Mengambil hasil dari pohon-pohon yang tumbuh liar.
- d. Membuka tanah dan kemudian mengerjakan tanah terus-menerus.
- e. Mengusahakan untuk diurus suatu kolam ikan.²

Jadi seorang warga persekutuan berhak untuk membuka tanah untuk mengerjakan tanah itu terus-menerus dan menanam pohon itu di atas tanah itu sehingga ia mempunyai hak milik atas tanah itu, hak milik ini dapat diperoleh, meskipun yang mengerjakan tanah itu praktis tidak boleh lebih dari satu atau dua kali panen.

Hak milik atas tanah ini dalam hal ini berarti pemiliknya berkuasa penuh atas tanah yang bersangkutan seperti halnya ia menguasai ternak, rumah atau benda miliknya. Hak milik atas tanah demikian ini, dikenal juga adanya hak milik terkekang atau terbatas atas tanah yaitu apabila pemilikan kekuasaan atas tanah tersebut di batasi oleh hak pertuanan desa.³

Menurut Sudargo Gautama hubungan hak ulayat yang dikenal dalam hukum adat ini tidaklah merupakan hubungan milik. Menurut hukum adat ini

² Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hal 107.

³ Ibid hal 108

dalam rangka hak ulayat dikenal adanya hak milik perseorangan. Hanya hak milik ini seolah-olah “dikekang” oleh hak ulayat.⁴

Kelemahan hukum tanah adat, pada umumnya berbentuk tidak tertulis sehingga oleh masyarakat, terutama oleh aparat pemerintah dan penegak hukum sulit memberi jaminan akan kepastian hukum atas tanahnya.

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 maka bangsa Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Agraria yang bersifat nasional, Undang-Undang tersebut lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Pokok Agraria yaitu untuk meletakkan dasar-dasar terbentuknya Hukum Agraria yang mampu membawa kebahagiaan dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur, untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum bidang agraria atau hukum pertanahan dan untuk memberi jaminan kepastian hukum seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu di dalam Undang-Undang Pokok Agraria dituangkan ketentuan-ketentuan konversi sebagaimana terdapat dalam Pasal I sampai Pasal IX ketentuan konversi Undang-Undang Pokok Agraria, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960 tentang pelaksanaan beberapa ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria untuk konversi tanah hak barat dan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 tentang penegasan konversi dan pendaftaran bekas hak adat.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria ini menunjukan kekuasaan pemerintah dalam menentukan eksistensi dari hak ulayat, dimana di satu sisi

⁴ Sudargo Gautama, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 54

pemerintah mengakui dan mengaturnya dalam peraturan Perundang-undangan walaupun disisi lain dalam peraturan yang sama itu juga pemerintah membatasi ruang gerak dalam pelaksanaannya. Dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 45 dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 ini memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.⁵ Memang Pemerintah memiliki kewenangan dalam hal mengatur urusan Agraria agar tidak terjadi monopoli penguasaan terhadap rakyat. Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut, digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Kekuasaan yang diberikan kepada negara untuk mengatur segala persoalan yang berkenaan dengan agraria harus dipergunakan untuk mencapai satu tujuan yang khusus ini Indonesia yang makmur, bahagia dan sejahtera.

Dalam Pasal 5 UUPA mengatakan hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Dengan demikian dinyatakan oleh ketentuan konversi selanjutnya akan hanya

⁵ Ibid hal. 94

berlaku ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria tentang hak-hak tanah dengan sekaligus menyatakan tidak berlaku lagi ketentuan-ketentuan dari Burgelijk wetboek (BW) dan berlakulah hukum agraria yang berdasarkan hukum adat

Di zaman Hindia Belanda dahulu Pemerintah Hindia Belanda berusaha agar tanah yang tunduk kepada hukum adat dikonversi menjadi hak-hak lain seperti dalam Staatsblad. 1931 NO. 168 dinyatakan bahwa penduduk bumi putra (di Jawa dan Madura saja) dari hak milik (*individueel erfelijk bezit*) dan hak bersama (*hak ulayat*) *agrarisch eigendomsrecht*.⁶

Sedangkan syarat untuk dikonversi yaitu:

- a. Bahwa sekurang-kurangnya tiga perempat dari yang berhak atas tanah tersebut berkeinginan dan cara pembagian tersebut menyetujuinya.
- b. Bahwa yang berhak atas pemakaian dari hak komunal tersebut mempunyai bagian dalam hak milik (*erfelijk individueel bezit*).
- c. Bahwa atas tanah jabatan diletakan di luar pembagian tersebut.

Bahwa setiap bumi putra yang mempunyai hak milik dapat mengkonversi hak tanahnya itu menjadi *agrarisch eigendom* dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan melampirkan gambar tanah dan telah bebas dari *landrente* atau pajak terhutang.

Keluarnya produk hukum oleh Pemerintah Hindia Belanda bertujuan:

- a. Merusak sendi-sendi hak ulayat yang ada sehingga menjadi hak-hak pribadi seseorang dengan mempercepat prosesnya dengan adanya produk hukum demikian.

⁶ A.P Parlindungan, Pendaftaran dan Konversi Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA, Alumni, Bandung, 1985, hal. 105.

b. Pada Agraris eigendom ini jelas bertujuan merombak lembaga-lembaga hak tanah adat kepada sistem lembaga menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sesungguhnya masih dalam masa transisi.

Sungguhpun sudah dikonversi menjadi agraris eigendomsrecht, hak-hak milik adat tersebut, namun kewajiban-kewajiban yang dibebankan seperti membayar pajak dibebankan kepada tanah bumi putra.

Konversi terjadi karena hukum pada tanggal 24 September 1960 di dalam Diktum kedua dari Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 dijumpai ketentuan-ketentuan mengenai perubahan atau konversi hak-hak yang lama menjadi salah satu hak yang baru menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Dengan adanya ketentuan tentang konversi itu maka Undang-Undang Pokok Agraria bukan saja mengadakan unifikasi Hukum Agraria tetapi juga unifikasi hak-hak atas tanah.⁷

Sedangkan ketentuan konversi yang diatur dalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya memberikan tempat yang terhormat kembali kepada hukum adat sebagai landasan Undang-Undang Pokok Agraria, sehingga seluruh hak-hak tanah yang ada baik yang tunduk kepada Burgelijk Wetboek (BW) maupun kepada hukum adat, dikonversi menjadi hak-hak yang tunduk kepada Undang-Undang Pokok Agraria seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai. Sungguhpun demikian ada juga sejumlah hak-hak yang pernah ada zaman Hindia Belanda sebagai produk hukum Perintah Hindia Belanda telah dihapuskan baik jauh sebelum Undang-Undang Pokok Agraria berlaku maupun dengan

⁷ Boedi Harsono, UUPA Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 1971, hal. 366.

berlakunya Undang Undang Pokok Agraria seperti tanah-tanah partikelir dan lain-lain.

Dalam Undang Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, memperkenalkan pendaftaran tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang ini mengatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam ayat (2) yang mengatakan bahwa pendaftaran tersebut meliputi:

1. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah.
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
3. Pemberian surat tanda bukti hak berlaku sebagai alat bukti.

Dalam masyarakat adat Dayak tidak lazim mensertifikatkan tanahnya.⁸ Mereka mempunyai hukum, mengatur soal tanah mereka yaitu hukum adat walaupun itu tidak tertulis. Biarpun tidak tertulis hukum adat mengatur cara kepemilikan tanah berkenaan dengan menjamin kepastian hukum hak milik adat dan orang luar harus menghormati hukum adat tersebut.

Dengan latar belakang pemikiran ini, mereka tidak merasa kegunaan pendaftaran tanah. Bahkan hal itu dianggap menambah beban, terutama dari segi ekonomis. Konversi hak milik adat bahkan mereka anggap sebagai penyimpangan terhadap norma-norma pemilikan tanah, mereka berpegang teguh selama ini yang

⁸Nico Andas Putra, Pelajaran dari Masyarakat Dayak, Institut Dayakologi, Pontianak, 2001, hal. 56.

mewarisi dari nenek moyang mereka. Bagi masyarakat, terpenting mereka biasa mendiami dan mengerjakan tanahnya.⁹

Sehingga warga masyarakat masih banyak belum melaksanakan konversi hak milik atas tanah adat guna mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti atas tanah yang kuat. Umumnya warga masyarakat mensertifikatkan tanahnya hanya karena mereka mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu, misalnya akan dijadikan angunan bank atau karena jual beli.

1. 2. RUMUSAN MASALAH.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konversi hak milik adat di Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan barat ?
2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan konversi Hak Milik Atas Tanah Adat (hak yang terkekang hak) di Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat?

⁹ Maria. S.W. Sumarjono, Hukum Pertanahan Dalam berbagai Aspek, bina Media, Medan, 2000, hal. 20.

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui keberadaan hak ulayat di Kecamatan Sanggau Ledo.
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan konversi hak ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang menyebabkan warga masyarakat Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat sampai saat ini masih banyak yang belum melaksanakan konversi hak milik atas tanah adat.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1. Bidang keilmuan.
Bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bidang pertanahan.
2. Bidang kemasyarakatan
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan masukan atau informasi bagi instansi terkait di Kabupaten Bengkayang, khususnya Kecamatan Sanggau Ledo.
 - b. Untuk masyarakat supaya mengetahui manfaat mengkonversi hak-hak adatnya.
 - c. Bagi pemilik tanah supaya segera mengkonversi hak milik atas tanah adat untuk memperoleh jaminan kepastian hukum

1. 5. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang pada intinya menguraikan hak ulayat, konversi hak milik adat sebelum keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria, setelah keluarnya Undang-Unddang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 yang mengakibatkan tanah harus dikonversi. Dalam bab ini juga membahas tentang tanah milik adat lazimnya tidak disertifikatkan oleh masyarakat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang Tinjauan terhadap hak ulayat mengenai pengertian hak ulayat, hak ulayat dalam Undang-Undang Pokok Agraria, ciri-ciri hak ulayat, subyek dan obyek hak ulayat, hak milik komunal dan hak milik perorangan, pembukaan hutan untuk lahan oleh masyarakat adat, program transmigrasi, Tinjauan hak milik atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria, tinjauan konversi hak atas tanah dan pendaftaran tanah.

BAB III CARA PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dalam penelitian kepustakaan digunakan sarana studi dokumen atau bahan pustaka yaitu dengan mempelajari bahan yang merupakan data sekunder. Sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk mencari data

primer dan penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan sarana berupa wawancara dan kuesioner. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan yang merupakan data sekunder atau di sebut juga penelitian kepustakaan, kemudian hasil dari penelitian dirumuskan dalam sebuah laporan yang bersifat deskriptif analitis. Dikatakan deskriptif analitis karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran secara jelas dan rinci serta sistematis mengenai faktor penghambat konversi hak milik atas tanah adat dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria di Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Bab ini menguraikan gambaran umum (monografi), struktur tanah, keadaan iklim dan gunung dan sungai merupakan kondisi Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat. Identitas responden, Keberadaan masyarakat adat mengenai keberadaan masyarakat adat Dayak, nilai dan jenis hukum adat, tata guna kawasan adat di Sanggau Ledo. Konversi hak milik adat sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria mengenai hak milik adat sebelum konversi dan sesudah konversi serta tata cara konversi. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan konversi hak milik atas tanah adat mengenai tidak mengertinya masyarakat, belum perlu, proses lama dan jarak yang jauh, biaya yang mahal. Upaya-upaya Pemerintah agar masyarakat mau

mengkonversi hak milik adat membahas mengenai penyuluh hukum, proyek nasional agraria (prona).

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Konversi hak milik adat prinsipnya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan mengakui hak hak yang sudah ada sebelum keluarnya peraturan tentang konversi dengan peraturan-peraturan mengenai konversi.

Faktor penghambat dari konversi hak milik atas tanah adat sehingga jarang dilakukan karena masyarakat adat tidak mengenal alat tulis menulis, biaya yang mahal, prosesnya lama, rendahnya tingkat pendidikan, kepercayaan masyarakat adat terhadap orang lain masih tinggi untuk menghormati tanah orang lain. Konversi hak milik dengan cara pengakuan tidak pernah dilakukan karena tidak ada alat buktinya, dan Kantor Badan Pertanahan Nasional menganjurkan permohonan sertifikat tanah milik adatnya dengan jalan permohonan tanah negara karena prosedurnya lebih cepat dan di lain pihak negara mendapat pemasukan biaya ganti rugi dari permohonan tanah negara tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. TINJUAN TERHADAP HAK ULAYAT

2. 1. 1. Pengertian Hak Ulayat.

Tanah ulayat merupakan suatu hak atas tanah tertua keberadaannya di bumi pertiwi, karena tanah ulayat eksistensinya sebelum lahirnya bangsa Indonesia sebagai negara merdeka. Jika dilihat dari peristilahannya istilah tanah ulayat ini berasal dari istilah *beschikkingrechts* dari Van Vollenhoven dalam kepustakaan hukum Indonesia diterjemahkan menjadi tanah ulayat. Istilah tanah ulayat ini tiap-tiap daerah di Indonesia berbeda-beda seperti di Ambon disebut *patuanan*, di Kalimantan di sebut *panyampeto* dan di Bali disebut *prabumian panjar* dan di Jawa disebut *wewengkon*.¹⁰

Hak ulayat menjamin kehidupan dari pada anggota-anggotanya dalam lingkungan ulayat tersebut, karena itu tiap-tiap anggotanya berhak untuk mengambil hasil dari tanah, binatang serta tumbuhan di atas ulayat tersebut. Hubungan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan persekutuan adalah timbal balik dan mempunyai daya kekuatan sama, artinya hak perseorangan mempertahankan diri terhadap hak persekutuan adalah sama kuatnya dengan hak persekutuan mempertahankan diri terhadap hak perseorangan.¹¹ Masyarakat ini mempunyai hak tertentu atas tanah dan

¹⁰ Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Tarsito, Bandung, 1984, hal 75.

¹¹ Ibid hal. 76.

melakukan haknya baik ke luar maupun ke dalam masyarakat itu. Berdasarkan atas berlakunya haknya ke luar, kumpulan ini sebagai kesatuan, berkuasa memunggut hasil dari tanah itu dengan menolak orang berbuat demikian. Sebagai kesatuan, mereka mereka bertanggungjawab terhadap orang-orang luar masyarakat atas perbuatan pelanggaran berdasarkan atas hak dari masyarakat itu bersama, dan anggota masyarakat itu berhadapan dengan anggota lain dengan jalan membatasi tuntutan dan hak perseorangan (untuk kepentingan masyarakat) dengan jalan melepaskan tanah-tanah perseorangan yang memunggut hasil untuk diri sendiri.¹²

Hak ulayat dan hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat didefinisikan sebagai kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu diwilayah tertentu merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, baik kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah bersangkutan.

Hak ulayat dalam pengertian hukum merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan ulayatnya, sebagai "lebensraum" para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, di dalam

¹²Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum adat, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 49.

wilayah tersebut.¹³ Wewenang dan kewajiban tersebut timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah bersangkutan. Hubungan itu selain merupakan hubungan lahiriah, juga merupakan hubungan batiniah bersifat religio-magisch yaitu berdasarkan kepercayaan para warga masyarakat hukum adat bersangkutan, bahwa wilayah tersebut adalah pemberian suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang diperuntukkan bagi kelangsungan hidup dan penghidupannya sepanjang masa. Maka hubungan itu pada dasarnya merupakan hubungan abadi.¹⁴

2. 1. 2. Hak Ulayat Dalam Undang-Undang Pokok Agraria.

Pada tanggal 24 September 1960 dibentuklah suatu produk hukum berupa Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan-Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam Undang-Undang ini ketentuan tentang tanah hak ulayat diatur Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria tersebut mengatur tentang eksistensi dan pelaksanaannya. Tentang eksistensi dari hak ulayat ini diakui sepanjang menurut kenyataannya hak ulayat masih ada dan tentang pelaksanaannya diberikan pembatasan yaitu harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, berdasarkan persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lebih tinggi.

¹³ Boedi Harsono, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Universitas Trisakti, Jakarta, 2002, hal. 54

¹⁴ Ibid hal. 55

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria ini menunjukan kekuasaan pemerintah dalam mendudukan hak ulayat di dalam Undang-Undang Agraria karena disatu sisi pemerintah mengakui dan mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan tetapi di satu sisi dalam peraturan pemerintah membatasi ruang gerak dalam pelaksanaannya.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang Undang Pokok Agraria pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan lebih tinggi. Dalam eksistensinya hak ulayat untuk menentukan menurut kenyataannya masih ada, Undang-Undang Pokok Agraria menentukan kriterianya. Ini terjadi interpersi sewenang-wenang terhadap eksistensi tanah ulayat. Sehingga akan sangat menguntungkan bagi pemerintah yang memiliki akses dengan tidak ditentukannya kriteria ini.

Menurut Maria S.W. Soemarjono untuk dapat membantu kita dalam menentukan masih ada tidaknya tanah hak ulayat itu di masyarakat ada tiga kriteria diberikan dengan berpegang pada konsepsi hak adat yaitu:

- a. Adanya subyek hak ulayat yaitu hukum adat memenuhi karakteristik tertentu.
- b. Adanya obyek hak ulayat berupa tanah.

- c. Adanya kewenangan dari masyarakat adat itu untuk mengelola tanah diwilayahnya termasuk menentukan hubungan hukum dan perbuatan hukum berkenaan dengan penyediaan, penentuan dan pemanfaatan serta pelestarian.¹⁵

Dalam tahapan selanjutnya pada masa reformasi, pemerintah kembali memperhatikan masalah tanah hak ulayat. Ini disebabkan oleh semakin panasnya gejolak masyarakat, persekutuan hukum adat atas tanah ulayatnya diambil pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk meminimalisir konflik dalam masyarakat maka pemerintah mengeluarkan Peraturan sebagai produk hukum berupa Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5/1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat, maka pengertian hak ulayat berdasarkan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan:

- 1. Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dan wilayah yang bersangkutan.**
- 2. Tanah ulayat adalah sebidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.**
- 3. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.**

¹⁵ Maria S.W Sumarjono, Hak Ulayat dan Masyarakat Adat, Bumi Bhakti Media Komunikasi Pertanahan, Edisi IX No. 09 Tahun 1995, hal 13-14

4. **Daerah adalah daerah otonom yang berwewenang melaksanakan urusan pertanahan sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.**

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, azas yang menonjol dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan adalah azas desentralisasi. Semuanya diatur di pusat dan daerah hanya sebagai pelaksana saja. Meski belum seperti otonomi diharapkan, dalam Undang Undang Otonomi Daerah yang baru daerah diberi cukup banyak otonomi untuk mengelola potensi daerahnya (pelaksanaan azas dekosentralisasi). Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 memang seakan-akan banyak peluang, tetapi sebenarnya ada hal-hal tertentu yang tetap dipegang pemerintah pusat. Sebagai salah satu contoh misalnya Pasal 10 ayat 1 daerah diberi kewenangan, tapi dalam Pasal 7 ayat 1 kewenangan itu dibatasi. Ibarat kepala dilepas tapi ekor tetap dipegang.¹⁶

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan:

1. **Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.**
2. **Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, system administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional.**

¹⁶ Edi Petebang, Kedaulatan Masyarakat Adat Yang Teraniaya, Aliansi Masyarakat Adat Kalimantan Barat (AMA) 2000, hal. 63.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan salah satu hasil dari reformasi. Undang-Undang ini menghapus Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan di daerah dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Kedua Undang-Undang tersebut sangat tidak mendukung masyarakat adat karena antara lain terjadi penyeragaman istilah, struktur pemerintahan adat, padahal masyarakat adat memiliki istilah tersendiri. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Pemerintah mengakui keberadaan Masyarakat Adat jika mempunyai: wilayah adat, lembaga adat, hukum adat dan masyarakat adat. Ada penghormatan terhadap asal-usul dan adat istiadat masyarakat adat dan mempunyai peluang untuk mengganti istilah desa. (Pasal 1 huruf O dan Pasal 93).

Pasal 93 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 ayat (1) menyatakan desa dapat dibentuk, dihapus dan/atau digabungkan dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD. Disini sebenarnya ada peluang istilah desa dihapus asal atas prakarsa masyarakat dan harus disetujui oleh Pemerintahan Kabupaten dan DPRD II. Dalam ayat (2) Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah. Jadi pembentukan atau penggabungan desa harus ditetapkan dalam peraturan daerah dimana kita harus terlibat dalam pembentukan sehingga bisa menyampaikan aspirasi masyarakat.

Jika dilihat dari Pasal 111 ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 yang berbunyi pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten, sesuai dengan pedoman umum yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang ini. Jadi aturan mengenai status desa ditetapkan dengan peraturan daerah dan pada ayat (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengakui dan menghormati hak, asal-usul dan adat istiadat desa.

1. 2. 3. Ciri-Ciri Hak Ulayat

Dalam kehidupan persekutuan hukum adat merupakan suatu kehidupan masyarakat di dalam badan-badan persekutuan bersifat kekeluargaan. Dalam hal ini merupakan satu kesatuan hidup bersama seperti berikut:

1. Mereka hidup dalam satu lingkungan sejak kecil.
2. Sejak masa kanak-kanak hingga tua mereka hidup seragam dalam satu hukum adat dan istiadatnya.
3. Mereka mengenal jelas sifat, corak dan tingkah laku mereka masing-masing.
4. Mempunyai kesamaan dan bertindak pada titik tolak dari hukum alam yang sama.
5. Mengulangi dan mengikuti segala persoalan hidup sejarah dan peristiwa lampau menjadi satu dasar pemecahan segala masalah hidup mereka.

6. Kebahagiaan mereka, gotong-royong dan ketentraman diharapkan semata-mata dari kawan sekelompok, baik secara berkelompok ataupun perseorangan.
7. Masing-masing tergabung dalam satu kelompok, bukan berdiri sendiri-sendiri.¹⁷

Besar dan eratnya hubungan rasa kekeluargaan mereka dalam segala upacara atau maksud-maksud mereka bukannya dapat dilakukan secara perorangan atau berpisah dari kelompoknya. Segala rencana atau apapun selalu dilakukan secara berunding mufakat.

Untuk mengetahui tanda-tanda masih adanya hak ulayat disuatu masyarakat hukum adat harus ada unsur:

1. Masyarakat adat yaitu terdapatnya sekelompok orang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, mengakui dalam penerapan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.
2. Wilayah yaitu terdapatnya tanah ulayat tertentu menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidup sehari-hari.
3. Hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya yaitu terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayatnya masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

¹⁷ J.U. Lontaan, *Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*, Bumi Restu, Jakarta, 1975, hal. 417.

4. Adanya pemerintahan sendiri.
5. Ada harta kekayaan berwujud maupun tidak berwujud.
6. Adanya kepala adat.

Menurut Van Vollenhoven adanya hak ulayat diberi enam tanda-tanda khusus yakni:

1. Hanya masyarakat hukum itu sendiri berserta warganya dapat dengan bebas mempergunakan tanah terletak dalam wilayahnya.
2. Orang asing (luar masyarakat hukum) hanya boleh mempergunakan tanah itu dengan izin, jika penggunaannya tanpa izin dipandang sebagai suatu delik.
3. Untuk penggunaan tanah tersebut kadang-kadang bagi warga masyarakat dipungut recognisi, tetapi bagi orang luar masyarakat hukum selalu dipungut recognisi.
4. Masyarakat adat bertanggungjawab terhadap delik-delik tertentu terjadi dalam wilayahnya, delik mana tidak dapat dituntut pelakunya.
5. Masyarakat adat tidak dapat melepaskan hak ulayat, memindah tangankannya ataupun mengasingkan secara menetap.
6. Masyarakat adat masih mempunyai campur tangan (intensip atau kurang intensip) terhadap tanah-tanah sudah diolah.¹⁸

Dalam berlakunya hak ulayat ke dalam masyarakat hukum berserta anggota-anggotanya dapat mempergunakan tanah secara bebas, namun dalam hal ini hak-hak perseorangan dari anggota masyarakat hukum dapat dibatasi

¹⁸ Maria A. Sumardjono, Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria, Andi Offset, Yogyakarta, 1982 hal. 6-7.

bagi kepentingan masyarakat hukum pada umumnya. Disinilah letak keistimewaan hak ulayat itu, yaitu adanya hubungan timbal balik antara hak ulayat dengan hak perseorangan.¹⁹

Tanah ulayat mempunyai hubungan hukum secara perdata yaitu hubungan hak bersama atas tanah ulayat tersebut, dimana setiap anggota persekutuan berhak untuk mengusahakan tanah yang merupakan hak bersama. Ada juga termasuk hukum publik, berupa tugas dan kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharannya.²⁰

Hak publik ini menjadi tanggungjawab dari penguasa persekutuan tersebut. Disamping itu tanah ulayat juga mempunyai hubungan mengembang dan mengempis, artinya jika semakin kuat hak atas tanah perseorangan atas tanah ulayat itu maka secara alamiah tanah ulayat semakin lemah begitupun sebaliknya. Sebagai contoh Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Februari 1959 No. 59/K/SIP/1958.

“Menurut hukum adat karo sebidang tanah “kesain” yaitu sebidang tanah kosong yang letaknya dalam kampung, bisa menjadi hak milik perseorangan, setelah tanah itu diusahakan secara intensip oleh seorang penduduk kampung itu.”

Disamping pengaruh yang terjadi secara alamiah itu hilangnya tanah hak ulayat atau berkurangnya tanah hak ulayat tersebut bisa juga disebabkan pengaruh yang datang dari luar berupa kebijaksanaan pemerintah dalam

¹⁹ I bid hal. 9

²⁰ Budi Harsono op. cit hal 190.

rangka kegiatan oleh pihak swasta. Hal ini sangat terasa pada pada masa orde baru yang terkenal dengan predikat orde pembangunan. Pada masa itu pemerintah menggalakkan pembangunan secara besar-besaran dengan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.

2. 1. 4. Subyek dan Obyek Hak Ulayat

Pemegang hak ulayat adalah masyarakat hukum adat bersangkutan, terdiri atas orang-orang yang merupakan warganya. Subyek hak ulayat bukan perorangan juga bukan kepala adatnya. Masyarakat hukum adat dengan berbagai nama menurut bahasa daerahnya masing-masing adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena tempat tinggal atau atas dasar kesamaan keturunan.

Pelaksana hak ulayat adalah penguasa adat, masyarakat hukum adat bersangkutan, yaitu kepala adat sendiri atau bersama dengan para tetua adat masing-masing. Penguasa adat dalam hubungannya dengan tanah ulayat melaksanakan tugas kewenangan yang termasuk bidang hukum publik sebagai petugas masyarakat hukum adatnya.

Sedangkan yang menjadi obyek hak ulayat itu sendiri adalah:

1. Tanah (daratan).
2. Air (perairan misalnya sungai, danau).
3. Tumbuh-tumbuhan yang hidup liar (pohon buah-buahan, pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar).

4. Binatang liar yang hidup, besar dalam hutan.²¹

Terhadap tanah yang telah diusahakan pengaruh dari hak ulayat tidak sama di berbagai daerah. Dalam hal ini dapat kita lihat adanya 3 tingkatan:

1. Hak ulayat yang menjadi kuat karena tidak ada pemiliknya lagi dan jatuh kepada masyarakat hukum dimana masyarakat hukum kemudian menyerahkannya kepada seorang anggota masyarakat hukum lainnya, akan tetapi pemilik baru ini terikat kepada aturan-aturan masyarakat hukum, dalam arti ia tak boleh memindahtangankan hak atas tanah tersebut dan setiap kali bila ia lalai mengerjakannya, tanah dapat diambil kembali.
2. Hak ulayat kuat berlakunya terhadap tanah merupakan milik inti penduduk selama ada anak laki-laki dan pemilik terus-menerus mengusahakan tanah tersebut, masyarakat hukum tak dapat mengizinkan perubahan-perubahan terhadap milik inti tersebut, tidak boleh diwariskan secara menyimpang dari aturan masyarakat hukum tersebut.
3. Di samping tanah milik inti tadi di dapat tanah pertanian dimana hak ulayatnya sudah menipis, campur tangan masyarakat hukum sedikit sekali, pemilik dapat dengan bebas menjual tanahnya.²²

Jadi seorang warga persekutuan berhak untuk membuka tanah untuk mengerjakan tanah itu terus-menerus dan menanam pohon itu di atas tanah itu sehingga ia mempunyai hak milik atas tanah itu, hak milik ini diperoleh meskipun yang mengerjakan tanah ini praktis tidak boleh lebih dari satu atau

²² Maria S Sumarjono, op cit, hal. 10.

dua tahun panen. Apabila hak mengerjakan tanah itu tidak lebih dari sekali panen saja, maka warga persekutuan memperoleh hak mempergunakan tanah dan bukan hak milik. Apabila kemudian tidak diurus lagi oleh pihak berkepentingan, maka tanah itu dikuasai lagi hak ulayat. Hak milik dari persekutuan hukum bersangkutan karena membuka dan mengerjakan tanah itu, dalam pengertian bahwa warga berhak sepenuhnya atas tanah, tetapi dengan ketentuan wajib menghormati:

1. Hak ulayat desanya.
2. Kepentingan-kepentingan orang lain yang memiliki tanah.
3. Peraturan-peraturan adat.²³

Hak milik atas tanah ini dalam hal ini berarti pemiliknya berkuasa penuh atas tanah yang bersangkutan seperti halnya ia menguasai ternak, rumah atau benda miliknya. Hak milik atas tanah demikian ini, dikenal juga adanya hak milik terkekang atau terbatas atas tanah yaitu apabila pemilikan kekuasaan atas tanah tersebut dibatasi oleh hak pertuanan.

Menurut Sudargo Gautama hubungan hak ulayat yang dikenal dalam hukum adat ini tidaklah merupakan hubungan milik. Menurut hukum adat ini dalam rangka hak ulayat dikenal adanya hak milik perseorangan. Hanya hak milik ini seolah-olah “dikekang.”

Kalau hak pertuanan desa itu masih sangat kuat, maka hampir tidak mungkin hak milik atas tanah ini dipindahkan ketangan orang lain dan jika hak pertuanan desa sudah tidak kuat lagi pengaruhnya, maka tanah itu dapat

²³ I bid. hal 108.

dimiliki terus-menerus sampai meninggalnya pemilik tanah dan kemudian oleh persekutuan ditetapkan lagi siapa yang menjadi pemilik baru. Apabila hak pertuanan desa itu sudah sangat lemah, maka hak milik atas tanah setelah wafatnya si pemilik tanah dengan sendirinya jatuh kepada tangan ahli warisnya dan ini hanya baru dapat dicabut apabila si pemilik tanah dan segenap keluarganya meninggalkan daerah desa tersebut untuk selamanya. Hak milik atas tanah yang terkekang inilah berdasarkan ketentuan-ketentuan konversi Pasal VII menjelma menjadi hak milik berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 pasal 20 ayat 1 tersebut.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 20 ayat (1) dinyatakan hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Dalam ayat (2) Hak milik dapat beralih dan dapat dialihkan kepada pihak lain.

Menurut studi yang dilakukan Institut Dayakologi ada 5 prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam menurut budaya Dayak yakni berkelanjutan, kebersamaan, keanekaragaman hayati, subsiten dan tunduk pada hukum adat.²⁴ Jika kelima prinsip ini secara konsisten dilaksanakan akan menghasilkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, bermanfaat secara ekonomis, tidak merusak secara ekologis dan secara budaya tidak menghancurkan.

Cara pengelolaan hutan tidak menguntungkan masyarakat sekitar hutan tersebut, akan menimbulkan perlawanan fisik yang dilakukan masyarakat adat

²⁴ Matheus Pilin, *Mengelola Hutan Darah Dan Jiwa Dayak, Sistem Hutan Kerakyatan Kalimantan Barat*, 1999, hal. 19.

terhadap aneka perusak alam hutan tersebut. Bahkan kini ada trend baru di berbagai kawasan masyarakat adat kembali mematok, menduduki dan mengambil kembali tanah-tanah adat mereka yang dirampas melalui berbagai proyek pembangunan. Konflik masyarakat adat menyangkut tanah dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

TABEL 1.
KONFLIK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DENGAN MASYARAKAT ADAT DAYAK
KALBAR 1998 – 2001.

No	Waktu	Perusahaan	Lokasi	Permasalahan	Aksi Masyarakat
3.	Mei 1988	PT Malindo Jaya	Kec. Jagoi Babang, Kab. Bengkayang	Perusahaan menipu masyarakat melalui seorang warga tanpa ijin warga masyarakat sehingga sawit pun beroperasi.	Warga sepakat menolak.
4.	Sept 1988	PT. Rana Wastu Kencana	Kampung Nyayat Sungai Enau Kec Tebas Kab. Sambas	Mengusur tanah adat, kuburan dan tembawang warga menipu warga dengan membuat tanda tangan palsu warga dalam kertas kosong	Warga menahan peralatan dan menuntut ganti rugi
5.	Okt 1998	PT. Kalimantan Sanggar Pusaka (KSP)	Nanga Belitang Kab. Sanggau	Kebun plasma terlambat dikonversi, warga trans merasa dibohongi.	Demo di kantor lyman Agro pontianak.
6.	Okt 1998	PT. Surya Deli (SD)	Kec.Sekada u Hilir, kab. Sanggau.	Kebun plasma lambat dikonversi, warga trans dibohongi.	Demo ke DPRD II Sanggau
7.	Des 1998.	PT. Multi Prima Entakai	Gonis Tekam, Kec. Sekadau Kab. Sanggau.	Kebun plasma tidak dikonversikan. Padahal warga sudah menyerahkan lahan minimal 3-4 ha/kk.	Demo ke DPRD II Sanggau.
8.	Jan	PT. Multi	Kec.	Lahan plasma tidak	Warga demo

	1999	Jaya Perkasa	Sekadau Hilir dan Sekadau Hulu Kab. Sanggau.	dikonversikan. Warga dibohongi dan dibiarkan tanpa kejelasan.	ke DPRD Kalbar dan kantor MJP di Pontianak.
9.	April 99	PT. Kalimantan Sanggar Pusaka (KSP)	Kec. Belitang Kab, Sanggau.	Warga lokal tidak sebagian kavlingan. Karena adanya jual-beli kavling.	Mengadu dan mendesak ke DPRD II Sanggau agar dibentuk tim independen.
10.	Mei 1999	PT. Aimer Agromas (AA)	Kampung pak Upat, kec. Sengah Temila Kab. Landak.	Perusahaan melakukan pembabatan hutan warga seenaknya, terutama hutan adat.	PT. Aimer Agromas dihukum adat.
11.	Juni 1999	PT. Multi jaya Perkasa.	Selalong kec. Sekadau Hilir dan sekadau Hulu kab. Sanggau.	Lahan plasma tidak dikonversikan. Warga dibohongi dan kehidupan mereka memprihatinkan.	Warga membakar camp dan alat-alat berat.
12.	Juli 1999	PT. Harapan Sawit Lestari (HSL)	Kec. Manismata kab. Ketapang.	Perusahaan ini mengubah status tanah warga dari hak ulayat menjadi hak guna usaha.	Menguasai sekitar 2000 Ha areal perusahaan dengan mematoknya dan menebangi pohon sawit.
13.	Juli 1999	PT. Mitra Austral Sejahtera (MAS).	Kec. Bonti, Parindu Tayan Hilir Kab Sanggau.	Perusahaan tidak memenuhi janjinya memberikan beasiswa seperti yang dipropagandakan saat kampanye.	Warga demo ke kantor bupati sanggau.
14.	Juli 1999	PT. Bangun Maya Indah.	Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang.	Masyarakat merana karena lahan plasma tak kunjung dikonversikan.	Warga mengutus Wiryo Haryono untuk mengadu ke Mentrans dan instansi

					terkait di Jakarta dan Pontianak.
15.	Desember 1999	PT. Mitra Austral Sejahtera (MAS)	Kec Bonti, Kab. Sanggau.	Perusahaan membohongi warga untuk memperkerjakan mereka. Malahan perusahaan semena-mena menggusur tanam tumbuh warga.	Warga menyita peralatan perusahaan namun diintrogasi polisi Sanggau.
16.	Januari 2000	PT. Harapan Sawit Lestari (HSL)	Kec. Manismata kab Ketapang.	Perusahaan menggusur tanam tumbuh, wilayah keramat dan ladang yang hendak ditugal.	Menuntut keadilan ke DPRD II Ketapang.
17.	Februari 2000	PT, Multi Prima Entakai	Engkersik, Kec. Sekadau Hilir, Kab Sanggau.	Perusahaan berjanji akan membangun jalan. Namun tidak di tepati. Malahan perusahaan membangun pabrik.	Warga marah dan mengobrak-abrik kantor MPE.
18.	Mei 2000	PT. Harapan Sawit Lestari	Kab. Ketapang.	Perusahaan diduga memanipulasi data untuk memperoleh kuncuran investasi US\$ 32 juta dan menjual kavlingan pada pejabat disana.	Berdemo ke DPRD Ketapang.
19	Juni 2000	PT. Mitra Inti Sejati Plantation	Sebakul, Kec. Sanggau Ledo, Kab Bengkayang	Perusahaan memperlak warga lokal untuk mengusir warga transmigrasi karena kewalahan dengan tuntutan warga transmigrasi atas haknya.	Warga transmigrasi mengadu ke DPRD Bengkayang.
20.	September 2000	PT. Polyplant Sejahtera	Di Marau Kec. Ketapang	3.469 warga transmigrasi terancam dan sebagian kelaparan karena tidak ada income. Sawit tak terjual dan pekerjaan tidak ada.	Petani pasrah karena tidak berdaya.
21.	Sept	PTPN XII	.Kec.	Pendapatan	Petani pasrah

	2000		Ngabang. Kab. Landak	masyarakat dari sawit memprihatinkan, hanya dibawah 100 ribu dan tidak punya jaminan masa depan	
22.	Januar i 2002	PT. Perkebunan Nusantara XIII	Kec. Kembayan, Kab Sanggau	Pembagian kavlingan plasma tidak sesuai dengan kesepakatan sewaktu penyerahan lahan. Banyak panen tidak terangkut, sehingga petani rugi. Perusahaan memanipulasi data.	Warga menutup lahan dan memblokir jalan di areal perkebunan
23.	Februa ri 2001	PT.PN XII I	Kab Sanggau	Tidak memberikan retribusi kepada kas Pemda. PTPN XIII tidak memberikan pekerjaan kepada putra daerah sehingga menimbulkan kecemburuan social	Belum ada tindakan.
24.	Agust 2001	PT Mutli Jaya Perkasa	Kec. Sekadau Hilir dan Hulu, Kab Sanggau	Janji perusahaan untuk mensejahterakan warga tidak terbukti malahan warga makin dipersulit	Warga Demo dan tuntutan ke DPR dan mengancam akan menguasai perusahaan kalau tidak ada perubahan.
25.	Sept 2001	PT Duta Sumber Nabati	Kampung Sungai Melayu, Kec Tumbang Titi Kab Ketapang	Masyarakat dipinggirkan, perusahaan tidak mau menyumbang untuk masyarakat	Puluhan pemuda Pesaguan di Sungai Melayu Mendatangi kantor PT DSN

Sumber: Data Institut Dayakologi 2001.

Pandangan Undang-Undang Pokok Agraria terhadap hukum adat tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria yaitu hukum agraria berlaku atas bumi dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dengan peraturan-peraturan lainnya.

Ketentuan Pasal 5 di atas jelas bahwa dasar hukum agraria (tanah) nasional adalah hukum adat. Tetapi hukum adat yang dimaksud adalah hukum adat yang dibatasi dengan suatu persyaratan yang disebutkan dibelakangnya yaitu tidak boleh bertentangan dengan:

1. Kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa.
2. Sosialisme Indonesia.
3. Ketentuan-ketentuan dalam UUPA.
4. Peraturan-peraturan lain di bidang agraria.
5. Unsur-unsur hukum agama.²⁵

2. 1. 5. Hak Milik Komunal dan Hak Milik Perseorangan

Menurut Van Vollenhoven wilayah Indonesia dibagi dalam beberapa lingkaran hukum, hal ini nampak jelas dari berbagai macam bentuk dan cara penyebutan pada hak-hak atas tanah asli Indonesia yaitu hak-hak dapat dimiliki oleh persekutuan-persekutuan hukum adat Indonesia baik kelompok maupun secara perorangan misalnya, desa, marga, suku dan sebagainya.

²⁵ K Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 12.

Hak atas tanah tersebut cara penyebutannya antara satu daerah dengan daerah lain beda-beda, akan tetapi secara garis besar dapat dibagi dalam dua golongan besar:

1. Hak purba/ hak ulayat/hak pertuanan yaitu hak dipunyai oleh suatu suku (klan/gen/stom) sebuah serikat desa atau biasanya oleh sebuah desa saja untuk menguasai seluruh tanah dan isinya dalam lingkungan wilayah itu.
2. Hak perorangan adalah suatu hak diberikan kepada warga desa atau orang luar atas sebidang tanah yang berada di wilayah hak ulayat/hak purba/persekutuan hak yang berbeda.²⁶

Menurut K. Van. Dijk pengertian hak milik atas tanah dalam hukum adat adalah hak-hak yang memberikan kebebasan bagi pemiliknya dalam batas-batas yang diperlukan oleh persekutuan, pemilikan segala hak pertuanan melakukan transaksi atas tanah, dimana hak pertuanan semakin kuat maka terlarang untuk mengalihkan hak milik kepada orang luar persekutuan.

Sehubungan dengan pengertian tersebut di atas Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa hak milik atas tanah ialah hak untuk memperlakukan suatu benda (tanah) sebagai kepunyaan sendiri dengan beberapa pembatasan. Hak untuk memperlakukan sebagai kepunyaan sendiri itu meliputi hak untuk memperoleh hasil sepenuhnya dari tanah dan hak untuk mempergunakan tanah itu seolah-olah pemegangnya itu pemiliknya, yang berarti ia boleh menjual, mengadaikan, atau menghibahkan tanah itu kepada orang lain.²⁷

²⁶ Imam Sudiyat, Hukum Adat Seketsa Azas, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, hal. 2

²⁷ Soedikno, Perundang-Undangan Agraria, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, 1987, Hal.2

Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hak milik atas tanah menurut Hukum Adat merupakan hak penuh dan mempunyai wewenang luas, yang dimiliki oleh pemegang haknya dibandingkan dengan hak-hak atas tanah lainnya, misalnya hak wenang pilih, hak menikmati hasil dan lainnya.

Seorang anggota masyarakat hukum dapat mempunyai hak untuk membuka tanah, hak mana tidak dapat dipunyai oleh bukan anggota masyarakat hukum tersebut. Cara menimbulkan hubungan hukum dengan tanahnya ialah dengan jalan memilih sebidang tanah tertentu dan dengan sepengetahuan kepala masyarakat hukum dengan membuat tanda larangan disertai upacara sekedarnya.

Setelah itu yang bersangkutan tidak menunjukkan sesuatu usaha nyata untuk mengolah tanah tersebut maka anggota masyarakat hukum lain dapat menuntut dan menyuruh yang bersangkutan memilih untuk mengerjakan tanah tersebut atau menyerahkannya kepada orang lain.

Bila yang bersangkutan memilih mengerjakan tanahnya, maka ia mempunyai hak memunggut hasil dari tanahnya. Akan tetapi bila setelah itu tanah tersebut ditinggalkan dan menjadi belukar kembali, maka tanah tersebut dikuasai lagi sepenuhnya oleh hak ulayat.

Jika terhadap bidang tanah tadi dikerjakannya secara terus menerus dengan tanaman-tanaman berumur lama maka hak atas tanah tersebut menjadi hak milik.

Bila bidang tanah menjadi sempit maka diperlukan izin membuka tanah, sifat daripada izin ini tidak sama dengan izin yang selalu diperlukan oleh

orang luar masyarakat hukum sebab izin tadi tadi hanya bersifat hak pengawasan dari masyarakat hukum.

Dalam hal terjadi perselisihan mengenai hak-hak atas tanah seperti dalam hak ulayat tanah hak milik dan hak pakai atas tanah, jual tahunan maka perdamaian sifatnya mengakhiri perselisihan dalam transaksi tanah atau perselisihan dalam prosedur cara menyelesaikannya dapat dengan musyawarah dan mufakat menurut adat setempat dengan ditengahi atau disaksikan oleh para pemuka adat setempat atau diselesaikan dengan bantuan petugas pemerintah desa setempat.²⁸

2.1.6. Pembukaan Hutan Untuk Lahan Oleh Masyarakat Dayak.

Pembukaan tanah oleh seorang yang hendak membuka sebidang tanah, mulanya mencari tanah yang baik di hutan. Sering dilakukan penujuman dalam pembukaan tanah ini, biasa terjadi di desa-desa dayak di Kalimantan dan dilakukan bersama-sama dan dipimpin kepala desa.²⁹ Wali tanah mencari hubungan dengan dewa-dewa untuk menetapkan tempat terbaik untuk bertani. Penebangan dan pembakaran kayu dilakukan bersama-sama petani yang bekerja perseorangan dengan meninggalkan sebuah tanda larangan tanah dan hutan yang telah dipilihnya, untuk membuktikan telah ada larangan bagi orang lain tanda larangan bermacam-macam bisa lingkaran rotan yang dipasang pada pohon kayu, atau kayu yang dipancang bersilang.

²⁸ H Hilman Hadikusuma, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 185.

²⁹ Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Sumur, Bandung, 1979, Hal. 64-65.

Jika ingin membuka lahan baru untuk ladang, terutama menggarap hutan perawan, harus dipenuhi syarat-syarat tertentu yakni:

1. Memberitahukan maksudnya kepada kepala suku atau kepala adat.
2. Seorang/beberapa orang ditugasi mencari hutan yang cocok dengan membaca tanda-tanda alam.
3. Jika sudah ditemukan kawasan hutan yang cocok, diadakan upacara adat pembukaan sebagai tanda pengakuan bahwa hutan atau bumi itulah yang memberi mereka hidup, dan berharap agar hutan yang di buka berkenan memberi hasil dan melindungi mereka.
4. Untuk membuktikan bahwa mereka mengembalikan apa yang diambil ada ketentuan atau kebiasaan bahwa hutan yang diolah itu hanya digunakan selama 2-3 kali masa panen, kemudian hutan itu harus dibiarkan agar tumbuh lagi, dan setelah 10 –15 tahun baru boleh dipergunakan lagi.³⁰

Kemudian sipengelola tanah minta persetujuan pemerintah desanya atas tanah pilihannya. Sejak persetujuan itu ia mendapat “hak wewenang pilih” yang dilindungi masyarakat. Jika sampai waktu yang terbaik dimulailah menebang pohon dan menebang semak belukar. Jika kayu sudah kering mulailah di bakar dan tak lama sebelum hujan, benih di tabur dan mulailah ia bertanam dan kemudian memeliharanya sampai panen. Dengan demikian ia mendapat hak menarik hasil dari tanah itu. Jika sudah panen ia mengolah tanah itu lagi secara terus-menerus itu lalu diperoleh hak milik atas tanah.³¹

³⁰ Matheus Pilin op. cit hal 17.

³¹ Ibid hal 65

Mata pencaharian orang dayak adalah berladang dan selalu berhubungan dengan hutan. Mereka memungut damar dari kayu meranti mengambil getah dari pohon karet mengambil madu dari lebah yang bersarang di pohon. Kalau mereka mengusahakan tanaman perkebunan, mereka cenderung memilih tanaman yang menyerupai tanaman hutan, seperti karet, rotan, tengkawang.

Mata pencaharian orang Dayak yang berorintasi pada hutan berpengaruh pula pada kultur material Dayak. Rumah panjang atau rumah penduduk yang masih asli dibuat seluruhnya dari kayu walaupun kini atapnya banyak dari seng. Tiang, Lantai, dinding, atap, pasak semuanya diambil dari hutan. Alat pengangkut berupa sampan dibuat dengan pengeruk batang pohon.

Kebudayaan non material Dayak juga banyak berhubungan dengan hutan. Cerita rakyat yang hidup dikalangan etnik Dayak bertutur tentang kehidupan di hutan atau sekitar hutan, bahkan pohon-pohon besar atau spesies kayu tertentu dipandang sebagai perlambang kekuatan supranatural. Banyak jenis pohon yang tidak boleh ditebang karena diyakini tempat bersemayam Tuhan mereka. Seni tari, nyanyi, ukiran, pahat semuanya berhubungan dengan burung-burung, mahluk kasar dan halus yang berdiam di hutan.

Ada paham yang hidup dalam masyarakat Dayak, bahwa hancurnya hutan akan menghancurkan kehidupan idiologi, budaya, sosial dan ekonomi mereka. Dan bahkan Jubata (Tuhan) akan mengutuk manusia yang menghancurkan hutan.

2.1.7. Program Transmigrasi

Dalam Konvensi Internasional Labor Organization 169 (konvensi Organisasi Buruh Internasional 169) pada Pasal 19 dinyatakan:

Program-program agraria Nasional harus memastikan bahwa program tersebut harus memperlakukan bangsa pribumi dan masyarakat adat sama dengan anggota penduduk lainnya sesuai dengan hal-hal yang telah disetujui dalam hubungan dengan:

1. Pengaturan tentang penyediaan tanah lebih luas bagi bangsa pribumi dan masyarakat adat ketika mereka tidak mempunyai areal sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk menyediakan hal-hal yang paling penting dan mendasar untuk kehidupan dan keberadaan mereka secara normal atau terjadi peningkatan jumlah (populasi) mereka.
2. Pengaturan tentang penyediaan sarana-sarana yang diperlukan untuk mempromosikan pengembangan yang dikuasai oleh masyarakat tersebut.³²

Dalam masyarakat adat marginalisasi melalui berbagai peraturan yang bersifat sentralistik, kebijakan itu mengubah sistem wilayah kekuasaan dan kekayaan adat menjadi bentuk desa.³³ Terjadi disfungsi pemerintahan adat di kalangan masyarakat khususnya di luar pulau Jawa, kepala desa menjadi penguasa tunggal yang lebih memperhatikan kepentingan Pemerintah di atas. Dia bertindak secara legal formal, di pihak lain ada kepala adat yang merupakan penguasa wilayah persekutuan masyarakat adat. Berbeda dari

³² Stepanus Djuweng, Konvensi ILO 169, Mengenai Bangsa Pribumi Dan Masyarakat Adat Di Negara-Negara Merdeka, Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, hal 39.

³³ Kusnaka Adimihardja, Hak Sosial Budaya Masyarakat, Konggres Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta, 15 - 16 Maret 1999.

kepala desa, kepala adat memerintah berdasarkan otoritas informal yang diberikan masyarakat. Dualisme kepentingan ini melemahkan potensi dan dinamika masyarakat desa untuk ikut aktif dalam pembangunan.

Buntut dari dualisme kepemimpinan adalah krisis kepemimpinan dapat dilihat dari tersingkirnya kepala adat dari sistem pemerintah desa. Mereka hanya dipercaya mengatur, melaksanakan upacara adat. Menyedihkan lagi upacara adat yang dipercaya kepada masyarakat adat sesungguhnya di selenggarakan sebagai komoditas pariwisata.

Konsep yang dilekatkan pada masyarakat di luar Jawa yang tinggal di hutan dengan mata pencaharian peladangan berpindah oleh Pemerintah dimukimkan di kampung-kampung.

Eksplorasi hutan oleh Hak Pengusahaan Hutan di luar Jawa dan Perhutani di Jawa yang berlebihan bertentangan dengan pandangan penduduk setempat bagi mereka. Hutan merupakan tempat yang harus dilestarikan. Program transmigrasi dilaksanakan Departemen Transmigrasi menimbulkan ketegangan di antara pendatang dan penduduk setempat. Ketegangan tidak dapat di hindari karena Pemerintah menempatkan mereka di atas tanah adat tanpa persetujuan ketua adat.³⁴ Melihat proses marginalisasi masyarakat adat berkaitan dengan faktor-faktor struktural sehingga sedikit-sedikit keberadaan tanah adat dimiliki perorangan.

Pulau Jawa yang semakin padat dan dalam rangka memperluas sentra-sentra perekonomian, maka dilaksanakanlah program transmigrasi. Dalam era

³⁴ Ibid hal 29.

orde baru program transmigrasi menjadi kebijakan pemerintah yang harus didukung semua rakyat Indonesia. Sejumlah perundang-undangan dibuat untuk mengaturnya karena itulah dalam pelaksanaannya sering terjadi pemaksaan bagi warga di pulau Jawa khususnya petani miskin dan rakyat miskin untuk bertransmigrasi ke luar Jawa.³⁵

Program transmigrasi di Indonesia sebenarnya sudah mulai dilakukan sejak jaman kolonial belanda tahun 1909 sebanyak 155 kepala keluarga penduduk dari pulau Jawa ditransmigrasikan ke Lampung dan Bengkulu. Tahun 1919 ditransmigrasikan lagi ratusan kepala keluarga penduduk pulau Jawa ke Sumatera Selatan dan antara tahun 1920-1921 ditransmigrasikan lagi ratusan kepala keluarga penduduk pulau Jawa ke Kalimantan Selatan. Penduduk pulau Jawa yang ditransmigrasikan dijadikan kuli pada perusahaan-perusahaan perkebunan milik pemerintah kolonial belanda.

Setelah Indonesia merdeka program transmigrasi dilanjutkan. Pemindahan penduduk besar-besaran melalui program transmigrasi ini terjadi pada era orde baru. Pada Tahun 1982 telah ditransmigrasikan 499.766 kepala keluarga dari target 500.000 kepala keluarga (sekitar 1,5 juta jiwa). Sampai tahun 2000 diperkirakan ada sekitar 5 juta kepala keluarga (sekitar 15 juta jiwa) sudah ditransmigrasikan. Belum termasuk transmigrasi sisipan yakni masyarakat adat sekitar lokasi pemukiman transmigrasi yang terpaksa menjadi transmigrasi karena hutan, tanahnya diambil alih. (terkadang dengan paksaan) untuk pemukiman transmigrasi.

³⁵ Jens Dhal, Masyarakat Adat di Dunia Eksistensi dan perjuangannya, Gramedia, Jakarta, 2001, hal. 84.

Sebelumnya transmigrasi identik dengan Jawanisasi (pemaksaan budaya Jawa), karena itulah sejak tahun 1990-an daerah asal transmigrasi tidak hanya pulau Jawa. Sudah ada transmigrasi asal Pulau Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Transmigrasi asal NTT dan NTB bukan karena kelebihan penduduk, tetapi karena disana kondisi alamnya sangat buruk (musim kering yang berkepanjangan). Daerah tujuan transmigrasi yaitu Kalimantan, Sumatera, Papua, Maluku dan Sulawesi.

Bagi pemerintah transmigrasi berhasil mengurangi kepadatan penduduk di pulau Jawa. Namun bagi masyarakat adat penerima transmigrasi, program transmigrasi merupakan sebuah bencana yang mengancam eksistensi mereka.

Persoalan terbesar program ini adalah terjadi konflik antara transmigran dengan masyarakat adat akibat budaya yang berbeda dan perlakuan pemerintah yang berbeda. Transmigran sebelum diberangkatkan dilatih dan setelah datang di daerah baru di beri rumah, tanah gratis serta disediakan jalan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah dan lainnya. Perlakuan seperti itu tidak pernah diberikan pemerintah terhadap masyarakat adat yang tanahnya diambil dan sumber penghidupannya di hutan diserahkan secara paksa untuk program transmigrasi.

Lokasi transmigrasi di Kecamatan Sanggau Ledo semuanya berasal dari tanah adat yang diserahkan kepada pemerintah daerah dengan perincian pada tabel sebagai berikut:

TABEL 2
LOKASI TRANSMIGRASI
DI KECAMATAN SANGGAU LEDO

NO	LOKASI	DESA	LUAS (Km)
1.	UPT I/Paket A	Sinar Tebudak	972
2.	UPT I/Paket B	Sinar Tebudak	678
3.	UPT II/Paket C	Kamuh	1.195
4.	UPT II/Paket D	Bengkilu	975
5.	UPT III/Romo	Gua	672
6.	UPT III/Duginang	Gua	828
	Jumlah		5.320

Sumber: Data Kantor Kecamatan Sanggau Ledo 2002.

Kedatangan transmigrasi juga menimbulkan persoalan-persoalan baru yang sangat substansial, seperti ganti rugi tanah masyarakat adat yang tidak sesuai, penghancuran kebudayaan masyarakat adat dan perusakan sumber daya alam karena program transmigrasi dipadukan dengan kebijakan Hutan Tanaman Industri-Transmigrasi (HTI-Trans), Tambak Inti Rakyat-Transmigrasi (TIR-Trans), Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi (PIR-Trans) yang membuka jutaan hutan primer untuk ditanami akasia, kelapa sawit, coklat, kelapa hibrida. Padahal hutan bagi masyarakat adat adalah sumber kehidupan dan penghidupan mereka. Jika hutan hilang, maka keberadaan masyarakat adat juga akan hilang.

Hadirnya transmigrasi di suatu kawasan pemukiman masyarakat adat jelas membawa dampak sosial budaya, ekonomi dan politik. Di daerah pemukiman transmigrasi di Kalimantan budaya masyarakat adat Dayak kalah dibandingkan budaya transmigrasi.

Dampak politik dirasakan masyarakat adat, dimana jumlah suara pemilih transmigran lebih banyak dibanding masyarakat adat. Sehingga melahirkan pemimpin yang tidak mampu membela masyarakat adat.

Di sisi lain dampak positif dari keberadaan transmigrasi terjadinya asimilasi lewat kawin campur diantara penduduk setempat dengan masyarakat pendatang. Para transmigran juga datang dengan membawa teknologi yang lebih maju sehingga dapat mengubah pola tani masyarakat setempat kearah yang lebih maju, sehingga produksi pertanian yang diperoleh akan lebih baik dan meningkat.

2. 2. TINJAUAN HAK MILIK ATAS TANAH MENURUT UUPA

Dalam ketentuan konversi Pasal II dinyatakan hak-hak atas tanah yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dikonversi menjadi salah satu hak menurut UUPA yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UUPA. Sebagaimana diketahui hak milik dapat berasal dari pemberian atas tanah negara dan dapat juga berasal dari konversi tanah milik adat.

Pasal 22 ayat 1 menentukan terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan-pemerintah dan Pasal 50 ayat 1 mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan Undang-Undang karena pengaturan yang dimaksud oleh Pasal 22 ayat 1 dan Pasal 50 ayat 1 belum ada, maka berlakulah ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa selama Undang-Undang mengenai hak milik belum terbentuk berlakulah ketentuan hukum adat setempat.

Pengertian hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 menyebutkan hak milik adalah hak yang turun-temurun, terkuat dan terpenuhi dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Dari Pasal tersebut di atas dapat dilihat, sifat khas dari hak milik atas tanah ialah hak turun temurun terkuat dan terpenuhi. Turun-temurun artinya bahwa hak milik dapat diwariskan kepada turunannya atau ahli warisnya apabila pemiliknya meninggal dunia. Terkuat artinya hak milik atas tanah dapat menjadi induk atau dibebani dengan hak atas tanah yang lain, misalnya dibebani dengan hak guna bangunan, hak pakai,

hak sewa, hak gadai, hak usaha bagi hasil dan hak menumpang. Terpenuhi artinya menunjukkan kewenangan sipemegang hak dalam menggunakan tanah baik untuk mendirikan bangunan ataupun untuk usaha pertanian.

Sifat hak milik dalam Pasal 6, menyebutkan bahwa hak atas tanah mempunyai fungsi sosial ini berarti bahwa semua hak atas tanah termasuk hak milik, dalam menggunakan atau tidak menggunakan tanahnya, tidak boleh semata-mata hanya untuk kepentingan pribadinya apalagi jika hal tersebut dapat menimbulkan kerugian masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya, sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan, kebahagiaan pada masyarakat dan negara. Ketentuan ini tidak berarti kepentingan perorangan akan terdesak oleh kepentingan bersama, tetapi antara kepentingan perseorangan dan kepentingan bersama haruslah seimbang sehingga akan tercapai tujuan yang dimaksud.

Subjek hak milik atas tanah ditentukan hanya yang mempunyai hak milik artinya hak milik atas tanah hanya dapat dipunyai oleh Warga Negara Indonesia dan menurut Undang- Undang No. 5 Tahun 1960 Pasal 9 ayat (2) dengan tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Bila dikaitkan dengan Pasal 21 ayat (4) untuk dapat mempunyai hak milik harus Warga Negara Indonesia tunggal. Meskipun pada dasarnya badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah, dan yang erat hubungannya dengan kehidupan keagamaan dan sosial maka oleh pembentuk Undang-Undang

diadakan suatu pasal pengecualian, yang memungkinkan badan hukum tertentu mempunyai hak milik atas tanah.³⁵

Berdasarkan hal tersebut maka menurut ketentuan Pasal 21 ayat (2) UU No 5 Tahun 1960 disebutkan bahwa oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang mempunyai hak milik, sebagai tindak lanjutnya dari ketentuan tersebut oleh Pemerintah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963, badan hukum mempunyai hak milik atas tanah menurut Peraturan Pemerintah tersebut adalah:

1. Badan-badan yang didirikan oleh negara.
2. Perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 79 Tahun 1958.
3. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendengar Menteri Agama.
4. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendengar Menteri Sosial.

Mengenai terjadinya hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 22 UUPA yang menentukan bahwa terjadinya hak milik yaitu:

1. Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan /Penetapan Pemerintah.
2. Selain menurut cara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini hak milik terjadi karena :

³⁵ Soedargo Gautama op. cit hal. 125 – 128.

- a. Ketetapan Pemerintah menurut cara dan syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Ketentuan Undang-Undang.

Jadi hak milik terjadi karena :

1. Menurut ketentuan Hukum Adat.
2. Menurut ketentuan Undang-Undang.
3. Menurut ketetapan Pemerintah.³⁶

Ad. 1. Menurut Ketentuan Hukum Adat.

Berdasarkan ketentuan hukum adat, hak milik atas tanah dapat terjadi karena proses pertumbuhan tanah ditepi sungai dan ditepi laut. Pertumbuhan tanah ini menciptakan tanah baru yang disebut lidah tanah. Lidah tanah ini biasanya menjadi hak milik dari tanah yang berbatasan karena sedikit banyak terjadi karena usahanya mengolah tanah secara terus-menerus maka terjadinya hak milik atas tanah berasal dari pertumbuhan ini.

Selain itu hak milik juga dapat terjadi karena pembukaan tanah, misalnya tanah yang semula hutan dibuka atau dikerjakan oleh seseorang, tetapi dengan dibukanya tanah itu hak milik atas tanah belumlah tercipta, yang membuka hanya mempunyai hak utama untuk menanam di tanah itu, kalau tanah hak pakai, hak pakai ini lama-kelamaan bisa bertumbuh

³⁶ Efendi Perangin, Hukum Agraria Indonesia, Rajawali Pers, 1991 hal. 242-243

menjadi hak milik, berkat usaha modal yang ditanam oleh orang yang membuka tanah tersebut.

Ad. 2. Menurut Ketentuan Undang-Undang

Terjadinya hak milik menurut ketentuan Undang-Undang berarti bahwa Undang-Undanglah yang menciptakannya. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria hak milik terjadi karena ketentuan konversi menjelaskan bahwa hak atas tanah yang ada saat itu dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria menjadi hak-hak yang sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Sebagai contoh Pasal II ayat (1) ketentuan konversi menyebutkan bahwa hak milik atas tanah adat yang disebutkan dalam Pasal II ketentuan konversi, dikonversi menjadi hak milik jika yang mempunyainya memenuhi syarat sebagai subjek hak milik.

Ad. 3. Menurut Ketetapan Pemerintah

Terjadi hak milik atas tanah menurut ketetapan Pemerintah adalah hak milik diberikan oleh Pemerintah dengan suatu penetapan dan tanah yang diberikan dengan hak milik itu tanah negara.

2.3. TINJAUAN KONVERSI HAK MILIK ATAS TANAH

Hak atas tanah diperoleh dari membuka tanah dan membuka hutan dengan mengerjakannya secara terus menerus dapat menjadi hak milik jika hak ulayatnya lemah. Hak milik atas tanah ini harus dikonversi berdasarkan

hak-hak yang ada dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Sikap dan filosofi dari konversi mempunyai 5 prinsip yang mendasarinya yaitu

1. Prinsip nasionalitas.
2. Prinsip pengakuan hak-hak tanah terdahulu.
3. Kepentingan hukum.
4. Penyesuaian kepada ketentuan konversi.
5. Status quo hak-hak terdahulu.³⁷

Ad.1. Prinsip nasional.

Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria secara jelas menyebutkan dalam Pasal 9, bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang boleh mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa.

Badan hukum Indonesia yang mempunyai hak-hak tanah di Indonesia tetapi untuk mempunyai hak milik hanya badan-badan hukum yang ditunjuk oleh PP 38 Tahun 1963 yaitu:

- a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara.
- b. Perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan UU No 79 Tahun 1958.
- c. Badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah Mendengar Menteri Agama.
- d. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria setelah mendengar Menteri Sosial.

³⁷ A.P. Parlindungan, *Konversi Hak-Hak Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 6.

Ad. 2. Pengakuan hak-hak yang terdahulu.

Ketentuan konversi di Indonesia mengambil sikap yang perikemanusiaan atas masalah hak-hak yang sebelum berlakunya UUPA yaitu hak-hak yang pernah tunduk kepada hukum adat karena konversi dari hak-hak tanah adat tidak ada batas waktu konversi dengan pertimbangan khusus, biaya, prosedur dan ketidakpedulian dari masyarakat untuk mensertifikatkan tanahnya.

Ad.3. kepentingan hukum.

Terkecuali hak-hak yang tunduk kepada hukum adat, tanah-tanah yang tunduk pada hukum barat telah berakhir konversinya dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai oleh negara kembali, namun dalam kenyataannya hak-hak yang terdahulu tetap diakui bahwa dalam memastikan untuk dapat dialihkan kepada orang lain untuk proyek pembangunan akan mendapat ganti rugi yang besarnya ditetapkan oleh suatu Panitia Penaksir.

Ad.4. Penyesuaian kepada ketentuan konversi.

Ketentuan konversi maupun Surat Keputusan Menteri Agraria maupun Surat Edaran yang diterbitkan ada padanan dari hak-hak yang pernah tunduk kepada burgelik Wetboek (BW) dan hukum adat dengan hak-hak yang diatur oleh Undang-Undang Pokok Agraria.

Ad. 5. Status quo hak-hak tanah terdahulu.

Setelah berlakunya ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 maka tidak mungkin diterbitkan lagi hak-hak tanah yang tunduk kepada hukum adat dan tanah barat dengan ketentuan Staatsblad. 1948 No. 54 tentang pembaharuan akta tanah baik hak eigendom, erfpacht dan opstal tidak dapat dilakukan lagi, demikian juga tidak mungkin diterbitkan lagi hak-hak tanah yang tunduk kepada Burgelijk Wetboek (BW).

Pandangan Undang-Undang Pokok Agraria terhadap hukum adat tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria yaitu hukum agraria yang berlaku atas bumi dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dengan peraturan-peraturan lainnya.

Pengertian konversi hak-hak atas tanah adalah perubahan hak atas tanah sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria diubah menjadi hak-hak atas tanah yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria.³⁸

Dasar hukum diadakan konversi hak milik adat dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada ketentuan konversi Undang-Undang Pokok Agraria Diktum II. Dasar

³⁸ Efendi Perangin, Op. Cit hal. 145.

hukum konversi hak milik adat yang sejenis haknya dapat dikonversi menjadi hak milik Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria diatur Pasal II dan Pasal VI ketentuan konversi Undang-Undang Pokok Agraria. Pasal II Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1962 ketentuan konversi menyebutkan:

- (1) Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak-hak dimaksud Pasal 20 ayat 1 seperti yang tersebut dengan nama sebagaimana di bawah, yang ada pada mulai berlakunya UU ini yaitu hak agrarisch eigendom, milik yayasan, andarbani, hak atas druwe, hak atas druwe pesini, grant sultan, landerbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelier dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya UU ini menjadi hak milik tersebut dalam Pasal 20 ayat 1, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam Pasal 21.**
- (2) Hak-hak tersebut dalam ayat (1) kepunyaan orang asing, warganegara yang disamping kewarganegaraan asing dan badan hukum yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) menjadi hak guna usaha atau hak bangunan sesuai dengan peraturan tanahnya, sebagaimana yang ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.**

Selain yang diuraikan dalam Pasal 11 tersebut maka tanah-tanah dengan hak adat yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria yang memberi kewenangan mirip dengan atau hampir sama dengan kewenangan yang ada pada hak milik, diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Pasal 20 ayat (1). Sebagai subyek hak milik seperti diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 21, syaratnya yaitu warganegara Indonesia tunggal. Apabila subyeknya badan hukum, harus merupakan badan hukum yang ditetapkan pemerintah yang dapat mempunyai hak milik.

Pelaksanaan konversi diperlukan suatu penegasan macam haknya dan subyeknya sebab hak yang lama dapat dikonversi setelah ada kepastian hak yang dikonversi, serta subyek haknya, maka jelas bahwa untuk pendaftaran bekas hak milik adat diperlukan penegasan tentang jenis hak lama dan penegasan tentang konversi hak tersebut menjadi hak apa, baru setelah itu dapat dilakukan pendaftaran. Untuk pelaksanaan pendaftarannya harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No: 24 Tahun 1997.

1. Hak milik adat sebelum konversi.

Sebelum Undang-Undang Pokok Agraria, menurut hukum adat hak milik atas tanah yang diperoleh dengan jalan:

- a. Membuka tanah hutan atau tanah belukar.
- b. Mewaris tanah.
- c. Menerima tanah karena pembelian.
- d. Daluarsa³⁹

2. Hak milik adat sesudah konversi

Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, mengenai terjadinya hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyebutkan:

1. Terjadi hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan Pemerintah.
2. Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hak milik terjadi karena:

³⁹ Imam Sudiyat, Op. Cit hal 9.

1) Penetapan Pemerintah menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

2) Ketentuan Undang-Undang.

Tata cara penegasan konversi dan pendaftaran telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962, yang dibedakan antara:

1. Penegasan konversi, dilaksanakan bagi tanah-tanah milik adat yang sudah mempunyai surat tanda bukti haknya (Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962).
2. Pengakuan hak, dilaksanakan bagi tanah-tanah milik adat yang tidak ada tanda bukti haknya (Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962).

Sebagaimana diketahui hak-hak adat juga dikonversi kepada hak-hak yang diatur oleh UUPA, sehingga kelak akan ada hanya satu macam hak yang sejenis di seluruh Indonesia yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna Bangunan, hak pakai, hak sewa dan sebagainya.

Atas tanah-tanah yang tunduk kepada hukum adat, dapat saja dikonversi menjadi hak milik, Hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak pakai.

Untuk mengajukan permohonan konversi tersebut maka harus melampirkan:

- a. Tanda bukti haknya (jika ada, juga surat ukurnya).

- b. Tanda bukti kewarganegarannya pada tanggal 24 september 1960 dan terserah kepada penilaian dari Kepala kantor Pendaftaran tanah yang bersangkutan.⁴⁰

Bagi tanah-tanah yang ada diuraikan dalam bukti surat maka untuk penegasan konversi harus mengajukan:

- a. Bukti pajak hasil bumi/Verponding Indonesia atau bukti lainnya dan jika ada disertai surat ukurnya.
- b. Surat keterangan kepala desa yang diperkuat oleh asisten wedana bahwa membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu menerangkan siapa yang mempunyai hak tersebut dan kalau ada turunan surat (surat-jual belinya).

Dalam hal Pengakuan hak untuk konversi atas hak-hak yang tidak ada atau tidak ada lagi tanda buktinya, maka diperlukan hasil pemeriksaan panitia pemeriksaan tanah A (SK Menteri Agraria SK 133/1961) dan telah dua bulan berturut-turut diumumkan di kantor kepala desa, asisten wedana dan Kepala Agraria yang bersangkutan dan tidak ada yang keberatan.

Menurut Pasal 83 Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, bahwa tugas Panitia A dalam pendaftaran tanah secara seporadis adalah sebagai berikut:

1. Meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan alat bukti tertulis mengenai pemilikan tanah secara lengkap.

⁴⁰ AP. Parlindungan, SH Op. Cit hal. 127.

2. Melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan keberatan alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah.
3. Mencatat sanggahan/keberatan dan hasil penyelesaiannya.
4. Membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang bersangkutan.
5. Mengisi daftar isian 201.

Untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pembuktian hak Panitia A dapat:

1. mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut.
2. Meminta keterangan tambahan dari masyarakat yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal di daerah tersebut.
3. Melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain dengan izin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut.⁴¹

Hasil penelitian data yuridis oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dan atau Panitia A dicantumkan dalam Risalah Penelitian Batas Yuridis dan Penetapan Batas.

⁴¹ Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Edisi 2000, Jakarta, hal. 618.

2.4. TINJAUAN TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 Pasal 46 dinyatakan:

1. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan peraturan Pemerintah.
2. Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.

Dalam Penjelasan Pasal 46 hak membuka tanah dan memungut hasil hutan adalah hak-hak dalam hukum adat yang menyangkut tanah. Hak-hak ini perlu diatur dengan Peraturan-Peraturan demi kepentingan umum yang lebih luas dari pada kepentingan orang atau masyarakat hukum yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 bagian kedua Pasal VII bahwa hak gogolan, pekulan atau sanggan yang bersifat tetap yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini menjadi hak milik berdasarkan pasal 20 ayat 1. Hak gogolan, pekulan atau sanggan yang tidak bersifat tetap menjadi hak pakai berdasar Pasal 41 ayat 1, yang memberi wewenang dan kewajiban bagi yang dipunyai oleh pemegang haknya saat mulai berlakunya Undang-Undang ini. Apabila terjadi keragu-raguan apakah sesuatu hak gogolan, pekulan atau sanggan bersifat tetap atau tidak tetap, maka Menteri Agrarialah yang memutuskan.⁴² Menurut Efendi Perangin bahwa hak gogolan sering disebut hak sanggaan atau hak pekulan ialah hak seorang gogol atas tanah komunal desa. Hak gogolan bersifat tetap terjadi kalau pengarap terus-menerus mempunyai tanah gogolan (tanah garapan) yang

⁴² I bid, hal. 25

sama dan jika ia meninggal dunia gogolan jatuh pada ahli warisnya yang tertentu.

Hak-hak atas tanah seperti hak gogolan, hak pekulan atau sanggaan hak yang diperoleh harus didaftarkan di Kantor Pertanahan. Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah maka pengertian pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan, yang dilakukan oleh Negara/Pemerintah secara terus-menerus berkesinambungan dan teratur, yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. **“Suatu rangkaian kegiatan”** menunjuk kepada adanya berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang berkaitan satu dengan yang lain yang bermuara dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan bagi rakyat. **Terus-menerus** menunjuk kepada pelaksanaan kegiatan yang sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. **Teratur** menunjukkan semua kegiatan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sesuai, karena hasilnya akan merupakan data bukti menurut hukum.

Kegiatan pendaftaran tanah meliputi pendaftaran tanah untuk pertama kali (initial registration) dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Pendaftaran tanah untuk pertama kali (initial registration) meliputi tiga bidang kegiatan bidang fisik, bidang yuridis dan penerbitan surat tanda bukti hak.⁴³

1. Bidang fisik atau teknis kadastral.

Kegiatan di bidang fisik mengenai tanahnya yaitu untuk memperoleh data mengenai letaknya, batas-batasnya, luasnya, bangunan-bangunan dan/atau tanaman-tanaman penting yang ada di atasnya. Dimulai dengan penetapan batas-batas serta pemberian tanda-tanda batas di tiap sudutnya kemudian diikuti kegiatan pengukuran dan pembuatan petanya.

2. Bidang yuridis.

Bidang yuridis mempunyai tujuan untuk memperoleh data mengenai haknya, siapa pemegang haknya dan ada atau tidak adanya hak pihak lain yang membebani. Pengumpulan data tersebut menggunakan alat pembuktian berupa dokumen.

3. Penerbitan dokumen tanda bukti hak.

Merupakan bentuk pendaftaran dan hasilnya, termasuk apa yang merupakan surat tanda bukti hak, termasuk sistem pendaftaran yang digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah oleh negara yang bersangkutan.

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui dua cara pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis.⁴⁴

⁴³ Budi Harsono, Op Cit hal. 74

⁴⁴ Ibid hal 75-76

Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran secara sistematis diselenggarakan atas prakarsa Pemerintah berdasarkan pada suatu rencana jangka panjang dan tahunan serta dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Pendaftaran secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau berbagai obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan yaitu pihak yang berhak atas obyek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya.

Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.

Dalam pendaftaran tanah sistem pendaftaran tanah yang digunakan adalah sistem pendaftaran akta (*registration of deeds*) dan sistem pendaftaran hak (*registration of title* dalam arti hak).⁴⁵ Dalam sistem pendaftaran akta, akta-akta itulah yang didaftar oleh Pejabat Pendaftaran Tanah. Apa yang tercantum dalam buku pendaftaran tanah dan surat tanda

⁴⁵ Ibid hal. 76

bukti hak yang dikeluarkan merupakan alat pembuktian yang mutlak. Pejabat pendaftaran tanah bersifat pasif, ia tidak melakukan pengujian kebenaran data yang disebut dalam akta yang didaftar.

Sedangkan sistem publikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah oleh suatu negara secara garis besar dikenal dua sistem yaitu sistem publikasi positif dan sistem publikasi negatif.

Sistem publikasi positif dengan mendaftarkan hak maka ada register sebagai bentuk penyimpanan dan penyajian data yuridis dan sertifikat hak sebagai surat tanda bukti hak. Dalam sistem publikasi negatif bukan pendaftaran, tetapi sahnya perbuatan hukum yang dilakukan yang menentukan berpindahnya hak kepada pembeli. Pendaftaran ini tidak memberi orang yang memperoleh tanah dari pihak yang tidak berhak, menjadi pemegang haknya yang baru. Dalam sistem ini berlaku azas nemo plus iuris yaitu orang tidak dapat menyerahkan atau memindahkan hak melebihi apa yang dia sendiri punyai. Dalam sistem publikasi dalam pendaftaran tanah ini Indonesia menganut sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif karena pendaftaran menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat.

Dalam sistem pendaftaran hak setiap penciptaan hak baru dan perbuatan-perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan kemudian, juga harus dibuktikan dengan suatu akta. Tetapi penyelenggaraan pendaftarannya bukan aktanya yang didaftar melainkan haknya yang diciptakan dan perubahan-perubahan kemudian. Akta merupakan sumber datanya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai konversi hak milik atas tanah adat (hak yang terkekang) di Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif ditunjang dengan yuridis sosiologis. Lebih lanjut dalam bagian ini juga dikemukakan tentang teori-teori yang digunakan secara jelas dan singkat untuk menjadi landasan menganalisa data yang diperoleh dengan melihat hubungan timbal-balik antara Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam masyarakat.

Hasil dari penelitian akan dirumuskan dalam sebuah laporan yang bersifat deskriptif analitis, dikatakan diskriptif analitis karena dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan rinci serta sistematis mengenai konversi hak milik tanah adat (hak yang terkekang hak) di Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat.

Penelitian mengenai konversi hak milik atas tanah Adat (hak yang terkekang) di Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat ini dilakukan dengan penelitian lapangan yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer dan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang berdasarkan

pada sumber pustaka untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, atau pendapat-pendapat yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari kepustakaan yang digunakan untuk menganalisa data primer. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan menggunakan alat pengumpul data yang terdiri dari wawancara, kuesioner dan observasi. Semua jenis data tersebut selanjutnya akan diarahkan pada upaya untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan konversi hak milik atas tanah adat (hak yang terkekang) di Kecamatan Sanggau Ledo yang telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga kepentingan para pihak dapat diwujudkan sesuai dengan harapan atau bahkan sebaliknya, dalam artian bahwa apakah justru kepentingan salah satu pihak telah dilanggar atau diabaikan oleh pihak lain.

Mengingat salah satu fungsi hukum adalah sebagai sarana kontrol bagi masyarakat, maka kaidah hukum harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian antara lain nilai dan fakta harus senantiasa diupayakan agar terjadi keseimbangan. Dalam melaksanakan penelitian hukum normatif langkah pertama adalah mencari dan mengumpulkan bahan baik primer, sekunder maupun tersier. Dalam mencari bahan-bahan tersebut perlu diketahui oleh peneliti sumber atau tempat dimana kita dapat memperoleh bahan tersebut.

3. 1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang ditunjang dengan yuridis sosiologis. Yuridis

normatif yang ditunjang dengan yuridis sosiologis yaitu penelitian mencari data dengan berpegang pada segi-segi yuridis dan hubungan timbal balik antara hukum dan apa yang terjadi di dalam masyarakat.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Dalam spesifikasi penelitian ini termasuk diskriptif analisis yaitu menggambarkan obyek yang diteliti berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya di dalam masyarakat.⁴⁵

3.3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian konversi hak milik atas tanah adat ini peneliti memilih lokasi penelitian di Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.

3. 4. Sumber Data

3. 4. 1. Data sekunder

Penelitian kepustakaan yaitu Penelitian dilakukan dengan cara membaca serta mempelajari peraturan yang berlaku, buku-buku, makalah hasil seminar, artikel, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Bahan yang diperoleh terdiri dari:

⁴⁵ Rony Hanitjo Soemitro, *Metode Hukum dan Jurimentri*, Galia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 97.

- a. Bahan Peraturan Perundang-undangan adalah bahan hukum yang mengikat yaitu:
 - 1 UU NO: 5 Tahun 1960.
 - 2 UU NO: 5 Tahun 1999.
 - 3 UU NO: 22 Tahun 1999.
 - 4 UU NO: 5 Tahun 1975
 - 5 PP NO: 24 Tahun 1997.
 - 6 PP NO: 3 Tahun 1997.
 - 7 PP NO: 10 Tahun 1961.
- b. Bahan pustaka yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum, yang meliputi: buku, makalah, hasil seminar, artikel dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

3.4. 2. Data Primer

Penelitian kepustakaan akan didukung dengan penelitian lapangan (penelitian empiris) sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara dengan nara sumber dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas atas beberapa aspek penting yang tidak diperoleh melalui kuesioner dengan mendasarkan pada butir-butir tertentu yang dinilai masih perlu penajaman.

Dalam wawancara digunakan tipe wawancara tidak berstruktur yaitu wawancara dengan pedoman yang hanya memuat hal-hal pokok atau

garis besar materi wawancara. Tipe wawancara tidak berstruktur ini dipilih dengan pertimbangan bahwa dengan wawancara tipe tersebut akan diperoleh beberapa keuntungan sebagai berikut:

1. Mendekati keadaan yang sebenarnya dan didasarkan pada spontanitas pihak responden.
2. Lebih mudah untuk mengidentifikasi masalah yang diajukan oleh pewawancara.
3. Lebih banyak kemungkinan untuk menjelajahi berbagai aspek dari masalah yang diajukan, penelitian yang dilakukan langsung di lokasi penelitian.

b. Kuesioner

Dengan kuisisioner dimaksudkan memperoleh gambaran yang lebih mendalam, lengkap dan luas di lapangan. Kuesioner disusun dalam dua model yaitu model tertutup dan terbuka. Model tertutup yaitu kemungkinan jawabannya sudah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diberikan kesempatan memberikan jawaban lain, sedangkan model terbuka yaitu kemungkinan jawaban tidak ditentukan terlebih dahulu dan responden bebas memberikan alasan dan jawaban.⁴⁶

3.5. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek yang diteliti terdiri dari 9 desa dan 30 dusun yaitu:

⁴⁶ Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta, 1989, hal. 177.

1. Desa Lembang
 - 1) Dusun Sanggau Kota.
 - 2) Dusun Jawa.
 - 3) Dusun Penda
2. Desa Danti
 - 1) Dusun Momong.
 - 2) Dusun Engkalang.
 - 3) Dusun Penembahan.
3. Desa Bange
 - 1) Dusun Kandasan.
 - 2) Dusun Merabu.
 - 3) Dusun Sejajah.
4. Desa Sango.
 - 1) Dusun Paling.
 - 2) Dusun Param.
 - 3) Dusun Minso.
 - 4) Dusun Sebalos.
5. Desa Pisak.
 - 1) Dusun Segiring.
 - 2) Dusun Dawar.
 - 3) Dusun Semandung.
 - 4) Dusun Segonde.

6. Desa Sinar Tebudak
 - 1) Dusun Taum.
 - 2) Dusun Setia Usaha.
 - 3) Dusun Setia Budi.
 - 4) Dusun Setia Bangun.
7. Desa Kamuh.
 - 1) Dusun Semawing.
 - 2) Dusun Setia Maju.
 - 3) Dusun Setia Karya
8. Desa Bengkilu.
 - 1) Dusun Setia Jaya.
 - 2) Dusun Laek.
9. Desa Goa.
 - 1) Dusun Duginang.
 - 2) Dusun Romo.
 - 3) Dusun Sumber Rejeki.
 - 4) Dusun Sumber makmur.

3.6. Metode Penentuan Sampel

Pengambilan sampel digunakan purposive sampling yaitu sampel diambil berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dianggap mempunyai hubungan yang erat dengan masalah yang akan diteliti. Ciri-ciri tertentu adalah

- a. Sampel adalah penduduk asli yang memiliki tanah yang berasal dari leluhur atau nenek moyangnya.
- b. Masyarakat adat tersebut mempunyai hak milik atas tanah adat (hak yang terkekang hak ulayat) dan belum dikonversi.

Dari keseluruhan populasi maka diambil 5 desa, dari setiap desa diambil sebanyak 3 dusun sebagai sampel yang terdiri:

- a. Desa Bange
 - 1. Kandangan.
 - 2. Merabu.
 - 3. Sejajah.
- b. Desa Sango.
 - 1. Dusun Param.
 - 2. Dusun Minso.
 - 3. Dusun Sebalos.
- c. Desa Pisak.
 - 1. Dusun Segiring.
 - 2. Dusun Dawar.
 - 3. Dusun Segonde.
- d. Desa Sinar Tebudak
 - 1. Dusun Taum.
 - 2. Dusun Setia Usaha.
 - 3. Dusun Setia Budi.

e. Desa Kamuh.

1. Dusun Semawing.
2. Dusun Setia Maju.
3. Dusun Setia Karya.

3.7. Nara sumber

1. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat.
2. Kepala Sub Pemetaan dan konversi Badan Pertanahan Kabupaten Bengkayang.
3. Kepala Seksi Pertanahan Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang.
4. Kepala Adat Desa Bange, Kepala Adat Desa Kamuh, Kepala Adat Desa Pisak, Kepala Adat Desa Sango, Kepala Adat Desa Sinar Tebudak.
5. Ketua dewan adat Kecamatan Sanggau Ledo.

3.8. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif yaitu suatu metode menghasilkan analisis data berdasarkan apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan. Data hasil analisis tersebut kemudian akan

dipergunakan untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir:

- a. Deduktif yaitu pola pikir yang mendasarkan dari konsepsi-konsepsi atau teori-teori yang bersifat umum lalu disimpulkan atau dijabarkan kehal-hal bersifat khusus.
- b. Induktif yaitu pola pikir yang mendasarkan pada ciri-ciri, penemuan-penemuan atau hasil penelitian dilakukan perpaduan yang bersifat khusus lalu disimpulkan ke hal-hal bersifat umum.

3.9. Jalannya Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan terdiri atas beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, tahap penelitian dan tahap penyelesaian.

3.9.1. Tahap persiapan.

Pada tahap persiapan ini dimulai dengan pengumpulan bahan kepustakaan, pra penelitian yang dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian kemudian dikonsultasikan dengan pembimbing. Setelah itu menyusun pedoman untuk melakukan wawancara, membuat kuesioner serta mengurus izin penelitian jangka waktunya adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan bahan-bahan.
- b. Pembuatan rancangan bahan-bahan.
- c. Pembuatan pedoman wawancara.
- d. Pengurusan izin penelitian.

3.9.2. Tahap Penelitian.

Pada tahap ini dilakukan penentuan responden dan penelitian lapangan diperoleh dari penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Di susun suatu pedoman wawancara dan kuesioner berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.
- b. Penelitian di mulai dengan menemui responden untuk meminta kesediaan sebagai responden, dan disertai dengan permintaan waktu untuk diwawancarai mengenai materi yang berhubungan dengan tesis. Wawancara berpedoman pada pedoman wawancara yang telah disusun. Apabila responden karena keterbatasan waktu sehingga tidak dapat dilakukan wawancara, maka sebagai gantinya kuesioner untuk dapat diisi kemudian ditentukan kapan kuesioner yang sudah diisi dapat diambil.
- c. Dalam penelitian lapangan ternyata mendapatkan hambatan antara lain:
 1. Pada waktu yang telah ditentukan responden tidak dapat ditemui peneliti.
 2. Data pendukung belum lengkap.
 3. Waktu wawancara yang sangat terbatas karena kesibukan responden.

Untuk mengatasi hambatan tersebut ditempuh jalan:

- a. Responden diminta untuk menetapkan waktu berikutnya sebagai ganti waktu yang batal.

- b. Memberikan kesempatan kepada responden untuk memperoleh data pendukung.

Jangka waktu penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan selama 1 bulan.
- b. Penelitian lapangan selama 1 bulan

3.9.3. Tahap penyelesaian.

Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan antara lain menganalisis data dari hasil penelitian dilanjutkan dengan penyusunan Tesis.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. GAMBARAN UMUM KECAMATAN SANGGAU LEDO

4.1.1. Monografi Kecamatan Sanggau Ledo

Kecamatan Sanggau Ledo adalah salah satu dari 9 Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Bengkayang, Propinsi Kalimantan Barat. Wilayahnya terletak dibagian utara Kabupaten Bengkayang termasuk daerah berbatasan dengan negara tetangga yaitu Malaysia Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Seluas.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ledo.
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas.⁴⁷

Kecamatan Sanggau Ledo berjarak kurang lebih 57 km dari Ibu Kota Kabupaten Bengkayang dengan waktu tempuh 1 ½ jam dan berjarak kurang lebih 275 km dari Ibu kota Propinsi Kalimantan Barat, dengan waktu tempuh 6 jam.

⁴⁷ Sumber Data Monografi Kantor Kecamatan Sanggau ledo, Tahun 2002.

Kecamatan Sanggau Ledo meliputi 9 desa dengan luas wilayah kurang lebih 612.50 km dan dengan jumlah penduduk Kecamatan Sanggau Ledo, pada akhir tahun 2001 berjumlah 19.291 jiwa, terdiri dari laki-laki: 10.040 jiwa dan wanita berjumlah 9.251 jiwa, sedangkan kepala keluarga: 6.029 kepala keluarga dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3
Luas Wilayah Dan Jumlah Penduduk Desa
Kecamatan Sanggau Ledo

N O	Desa	Luas (Km2)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Lembang	52,00	1.636	1.580	3.216
2	Gua	63,00	1.033	895	1.928
3	Danti	92,50	495	511	1.006
4	Bange	79,50	928	899	1.827
5	Sango	105,50	814	751	1.565
6	Pisak	127,00	1.183	1.059	2.242
7	Bengkilu	33,00	1.212	1.118	2.330
8	SinarTebulak	29,00	1.744	1.557	3.301
9	Kamuh	32,00	995	1.118	1.876
	Jumlah	612.50	10.040	9.251	19.291

Sumber: Kantor Kecamatan Sanggau Ledo 2002.

Penduduk di kecamatan Sanggau Ledo bersifat heterogen dari suku Dayak, Jawa, Melayu, Cina dan lain-lain yang tersebar di 9 desa dan 30 dusun dengan perincian:

1. Suku Dayak 46,0 %
2. Suku Jawa 42,2 %
3. Suku Melayu 9,3 %
4. Cina 0,5 %

5. Bugis, Batak , Madura, 2,0 %⁴⁸

Mutasi penduduk di Kecamatan Sanggau Ledo pada tahun 2002 antar desa dalam kecamatan, antar kabupaten dalam propinsi dan antar propinsi relatif kecil. Pada umumnya perpindahan penduduk ini adalah untuk mencari pekerjaan dan mencari lahan baru seperti warga transmigrasi Desa Kamuh, Sinar Tebudak pindah ke Desa Semelagi Besar Kecamatan Selakau dan dari Kecamatan Sanggau Ledo mencari pekerjaan dilokasi perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Ledo.

Lapangan kerja Kecamatan Sanggau Ledo menurut penggolongannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Mata Pencarian/Pekerjaan

No	Desa	Petani	Pedagang	PNS	ABRI
1	Lembang	890	50	156	30
2	Gua.	1.231	10	24	-
3	Danti.	374	8	6	-
4	Bange.	1.027	15	88	-
5	Sango.	1.681	8	18	-
6	Pisak.	865	10	18	-
7	Bengkilu.	928	10	17	-
8	Sinar Tebudak	1.350	15	31	-
9	Kamuh	684	8	11	-
	Jumlah	2.030	134	369	30

Sumber : Data kantor Kecamatan Sanggau Ledo 2002

⁴⁸ Sumber Data Kantor Kecamatan Sanggau Ledo, Tahun 2002.

Pada tabel ini dapat dilihat bahwa mata pencarian petani yaitu 2.030 jiwa atau 79,2 % dari penduduk yang bekerja sebagai petani.

Adapun jumlah penduduk Kecamatan Sanggau Ledo menurut tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Sanggau Ledo.

Tabel 5
Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Sekolah	2.210
2	SD	7.423
3	SMP	1.973
4	SMU	1.243
5	D3/S1	390
Jumlah		13.339

Sumber: Data Kantor Kecamatan Sanggau Ledo 2002

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan paling banyak adalah tamatan SD/ sederajat sebanyak 7.423 jiwa.

4.1.2. Struktur Tanah.

Keadaan permukaan tanah di Kecamatan Sanggau Ledo sebelah utara, timur dan selatan merupakan daratan tinggi yang berbukit-bukit, sedangkan sebelah baratnya terdiri dari daratan rendah yang berawa-rawa. Hal ini memungkinkan keadaan tanah di Kecamatan Sanggau Ledo sebagai berikut:

1. Faktor alamnya terutama keadaan tanahnya memungkinkan untuk pertanian, perkebunan dan lain-lain.
2. Jalan raya yang telah selesai dikerjakan pemerintah dari Kota Singkawang ke Sanggau Ledo dan keperbatasan negara tetangga yaitu Serawak Malaysia Timur yang merupakan sarana lalu lintas induk yang menentukan perkembangan dan kemajuan wilayah Kecamatan Sanggau Ledo.
3. Selain jalan darat sungai berfungsi sebagai sarana perhubungan seperti sungai setinggi, sungai sambas kecil, yang seluruhnya bermuara ke sungai sambas besar.
4. Wilayah Kecamatan Sanggau Ledo sebagian besar masih terdapat hutan belukar yaitu bagian utara, barat dan timur. Sedangkan di selatan terdapat alang-alang dan semak-semak.⁴⁹

Jenis tanah kecamatan Sanggau Ledo adalah tanah Latosel dengan kemiringan antara 25 – 45 derajat.

Kecamatan Sanggau Ledo dengan luas 613,50 km dengan penggunaan lahan terdiri dari lahan sawah, lahan kering dan lahan lainnya dengan rincian penggunaan seperti tabel berikut:

⁴⁹ Data Kantor Kecamatan Sanggau Ledo, Tahun 2002.

Tabel 6
Penggunaan Lahan Dan Luas Lahan

No	Penggunaan	Luas (Hektar)
I	Lahan Sawah	
	a. Irigasi teknis.	149
	b. Irigasi sederhana.	50
	c. Irigasi desa/non PU	730
	d. Tadah hujan	639
II	Lahan Kering	
	a. Perkarangan.	1.653
	b. Ladang/huma.	10.960
	c. Tegal/kebun.	12.450
	d. Pengembalaan/padang rumput.	100
	e. Sementara tidak diusahakan.	4.120
	f. Ditanami pohon/hutan rakyat.	3.965
	g. Hutan Negara.	20.136
	h. Perkebunan.	4.200
	i. Lain-lain	1.766
III	Lahan Lain	
	a. Rawa-rawa (tidak ditanami)	418
	b. Tambak	-
	c. Kolam/tebat/empang	25
	Jumlah	61.350

Sumber: Data Kantor Kecamatan Sanggau Ledo 2002.

Kecamatan Sanggau Ledo sangat potensial untuk dikembangkan pada sektor pertanian, perkebunan dan peternakan, potensi serta sub sektor tersebut dapat dilihat seperti tabel berikut ini:

Tabel 7
Potensi Petanian, Perkebunan, Perternakan
Kecamatan Sanggau Ledo

No	Sektor/Sub Sektor	Jumlah/Satuan
1	Pertanian Tanaman Pangan	
	- Sawah	1.000 hektar
	- Lahan kering.	2.500 hektar
	- Jagung.	8.500 hektar
	- Kedelai.	500 hektar
	- Kacang tanah.	300 hektar
	- Ubi kayu	500 hektar
	- Ubi rambat	300 hektar
2	Perkebunan	
	- Lada.	650 hektar
	- Karet.	2.675 hektar
	- Kopi.	97 hektar
	- Kakao.	19 hektar
	- Kemiri.	15 hektar
3	Perternakan	
	- Sapi.	3.729 ekor
	- Kambing.	1.726 ekor
	- Ayam buras.	36.883 ekor
	- Ayam buras pedaging.	3.500 ekor
	- Itik.	447 ekor
	- Angsa.	175 ekor
	- Babi.	221 ekor

Sumber : Data Kantor Kecamatan Sanggau Ledo 2002

4.1.3. Keadaan Iklim/Curah Hujan.

Wilayah Kecamatan Sanggau Ledo pada umumnya beriklim tropis dengan suhu tertinggi 31,05 C dan suhu terendah 22,9 C sedangkan suhu pada siang hari rata-rata 29 C dengan ketinggian 120 m dari permukaan laut, curah hujan di Kecamatan Sanggau Ledo rata-rata 2.000 mm dan

hari turun hujan rata-rata 210 hari, perbulan dengan intensitas hujan 20,7 – 27,7 mm per hari (sedang).

Adapun data-data curah hujan tahun 2001 adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Tingkat Curah Hujan Tahun 2001

No	Bulan	Tahun 2001 (9 Mm)
1.	Januari	98 mm
2.	Pebruari	207 mm
3.	Maret	139 mm
4.	April	416 mm
5.	Mei	131 mm
6.	Juni	397 mm
7.	Juli	234 mm
8.	Agustus	98 mm
9.	September	334 mm
10.	Oktober	1033 mm
11.	November	602 mm
12.	Desember	597 mm
	Jumlah	4.286 mm

Sumber: Data Kantor Kecamatan Sanggau Ledo 2002.

4.1.4. Gunung dan Sungai.

Wilayah Kecamatan Sanggau Ledo sebagian besar adalah daratan tinggi terdapat gunung-gunung diantaranya.

1. Gunung Niut dengan ketinggian : 1.704 M.
2. Gunung Sarang dengan ketinggian : 1.550 M
3. Gunung Bayang, Semandum, Bara, Sepur Bengkilu.

4.2. IDENTITAS RESPONDEN

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang konversi hak milik atas tanah adat di Kecamatan Sanggau Ledo dengan mengambil responden yaitu pemilik tanah sebanyak 60 responden, maka dapat diketahui mengenai gambaran keadaan responden.

Keadaan responden jika dikelompokkan berdasarkan usia responden dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9
Usia Responden

No	Usia	Responden	Prosentase
1	30 - 40	12	12 %
2.	40 - 50	21	21 %
3.	50 - 60	17	17 %
4.	60 - ke atas	10	10 %
	Jumlah	60	100 %

Sumber: Data primer tahun 2002.

Dari tabel di atas, usia responden berkisar 40 – 60 tahun ke atas ada 48 responden, ini berarti pada tanggal 24 September 1960 responden yang bersangkutan telah lahir dan juga sebagai warga negara Indonesia. Dengan demikian responden yang bersangkutan memenuhi syarat untuk mengajukan konversi seperti yang ditentukan dalam PMPA NO. 2 tahun 1962.

Selanjutnya tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 10 berikut ini:

Tabel 10
Tingkat Pendidikan Responden

No	Pendidikan	Responden	Prosentase
1.	Tidak Sekolah	5	8,3 %
2.	SD	27	45 %
3.	SLTP	16	26,7 %
4.	SMU	8	13,3 %
5.	Akademi/Sarjana	4	6,7 %
	Jumlah	60	100 %

Sumber: Data primer Kecamatan Sanggau Ledo tahun 2002.

Dari tabel 10 di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan responden tergolong rendah yaitu SD sebanyak 27 responden atau 45 %. Dalam hal ini tingkat keadaan penduduk di sana amat memperhatikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari saja masih kekurangan sehingga mereka banyak yang tidak mengenyam pendidikan. Dengan keadaan yang demikian itu maka wajar saja jika banyak warga yang belum mengkonversi hak milik adatnya.

Keadaan responden jika dikelompokkan berdasarkan jenis pekerjaan terlihat pada tabel 11 berikut:

Tabel 11
Pekerjaan Responden

No	Jenis Pekerjaan	Responden	Prosentasi
1.	Petani	41	68,4 %
2.	Pedagang.	8	13,3 %
3.	Pegawai Negeri	6	10 %
4.	ABRI/Pensiunan	5	8,3 %
	Jumlah	60	100 %

Sumber: Data primer Kecamatan Sanggau Ledo 2002.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian responden mempunyai pekerjaan sebagai petani sebanyak 41 responden atau 68,4 %. Prosentase terkecil bermata pencarian ABRI/pensiunan sebanyak 5 responden atau 8,3 %. Dengan demikian pekerjaan sebagian besar masyarakat adalah petani. Jika dilihat dari segi ekonomis amatlah sedikit responden yang mampu mengkonversi hak milik adatnya. Jika dilihat dari aspek lainnya seharusnya mereka segera mengkonversi hak miliknya supaya mempunyai alat bukti yang kuat sehingga mereka dapat terhindar dari permasalahan yang mungkin akan timbul dikemudian hari.

4.3. KEBERADAAN MASYARAKAT ADAT DI KECAMATAN SANGGAU LEDO.

4.3.1. Keberadaan Masyarakat Adat Dayak.

Karakteristik masyarakat adat di Kabupaten Bengkayang memiliki beberapa kesamaan, baik adat istiadat, hukum adat, tata guna kawasan adat maupun struktur pemerintahan adat. Di Kabupaten Bengkayang termasuk Sub Dayak Kanayan dapat di kelompokkan 3 sub suku Dayak yakni sub Suku Dayak Benyadu, sub Suku Dayak Benana dan sub Suku Dayak Bekati. Sedangkan yang bertempat tinggal di Kecamatan Sanggau Ledo mayoritas sub Suku Bekati. Sub Suku Bekati yang ada di sanggau Ledo ini dapat dikelompokkan dalam 2 golongan biasanya berdasarkan binua yaitu:

A. Sub suku Bekati sara atau binua sara meliputi:

- 1 Desa Lembang
 - a. Dusun Sanggau Kota.
 - b. Dusun Jawa.
 - c. Dusun Penda
- 2 Desa Danti
 - a. Dusun Momong.
 - b. Dusun Engkalang.
 - c. Dusun Penembahan.
- 3 Desa Bange
 - a. Dusun Kandangan.

- b. Dusun Merabu.
 - c. Dusun Sejajah.
- 4 Desa Pisak.
 - a. Dusun Segiring.
 - b. Dusun Dawar.
 - c. Dusun Semandung.
 - d. Dusun Segonde.
- 5 Desa Sinar Tebudak
 - a. Dusun Taum.
 - b. Dusun Setia Usaha.
 - c. Dusun Setia Budi.
 - d. Dusun Setia Bangun.
- 6 Desa Kamuh.
 - a. Dusun Semawing.
 - b. Dusun Setia Maju.
 - c. Dusun Setia Karya.
- 7 Desa Bengkilu.
 - a. Dusun Setia Jaya.
 - b. Dusun Laek.
- 8 Desa Goa.
 - a. Dusun Duginang.
 - b. Dusun Romo.
 - c. Dusun Sumber Rejeki.

d. Dusun Sumber maknur.

B. Sub Suku Bekati Riok atau binua riok meliputi:

1 Desa Sango.

a. Dusun Paling.

b. Dusun Param.

c. Dusun Minso.

d. Dusun Sebalos.

2 Desa Saham, Desa Sujah, Desa Panjak yang karena perkembangan kecamatan menjadi masuk dalam Kecamatan Sehuas.

Suatu binua bisa terdiri dari beberapa desa. Penentuan binua ini berdasarkan persamaan dialek bahasa, kemiripan hukum 'adat atau aturan hukum adat setempat. Dalam binua di kepalai oleh seorang kepala binua disebut Singa, sementara setiap desa ada ketua adatnya, ketua adat tersebut mengurus tentang perkara seperti tindakan-tindakan kriminal misalnya perkelahian, perceraian, perzinahan, pencurian dan lain-lain.

Apabila terjadi suatu perkara maka penyelesaiannya dilakukan dilakukan dihadapan ketua adat yang ada di setiap desa, jika masalah ditingkat ketua adat tidak terselesaikan maka perkara akan diselesaikan di tingkat Kepala binua.

4.3.2. Nilai Dan Jenis Hukuman Adat.

Adapun sanksinya sudah ditentukan dalam aturan adat Binua Riok dan Binua Sara berdasar Surat Keputusan Rapat Musdat Kecamatan Sangaau Ledo No. 1/II/BR/2002 dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian:

a. Jenis dan nilai-nilai:

1. Tempayan siam Rp. 160.000 + tutup 50 % Rp. 240.000.
2. Tempayan alang Rp. 80.000 + tutup 50 % Rp. 120.000.
3. Tempayan gerondong Rp. 60.000 + tutup 50 % Rp. 90.000.
4. Tempayan kunyit Rp. 60.000 + tutup 50 % Rp. 75.000.
5. Tempayan manduh. Rp. 40.000 + tutup 50 % Rp. 60.000.
6. Tempayan baban tanpa tutup Rp. 30.000.
7. Piring/mangkok nilai khususnya Rp. 10.000.
8. Administrasi, saksi perkawinan untuk pasangan sumi istri
Rp. 30.000.
9. Pelanggaran hukum adat berat yang berat seekor babi seberat
25 KG + 1 ekor ayam + anjing.
10. Uang administrasi tingkat dusun Rp. 20.000 dan desa/binua
Rp. 25.000.

b. Nilai-nilai dan jenis tanaman:

- | | | | |
|---------------|-------------------|-----|-------------|
| 1. Tengkawang | Rp. 25.000/75.000 | s/d | Rp. 100.000 |
| 2. Durian | Rp. 25.000/75.000 | s/d | Rp. 100.000 |
| 3. Langsung. | Rp. 25.000/75.000 | s/d | Rp. 100.000 |

4. Rambutan. Rp. 20.000/50.000 s/d Rp. 75.000
5. Rambai. Rp. 10.000/25.000 s/d Rp. 50.000
6. Duku-kuntub. Sejenisnya Rp. 10.000/25.000 s/d Rp. 50.000
7. Kopo dan kokoa. Rp. 10.000/25.000 s/d Rp. 50.000
8. Cengkeh. Rp. 5.000/15.000 s/d Rp. 50.000
9. Kemiri/Keminting Rp. 5.000/15.000 s/d Rp. 50.000
10. Keranji/sejenisnya. Rp. 2.000/ 5000 s/d Rp. 25.000
11. Karet Rp. 1.000/ 2.500 s/d Rp. 5.000
12. Sagu Rp. 5.000/10.000 s/d Rp. 25.000
13. Pisang. Rp. 1.000 / 3.000 s/d Rp. 10.000
14. Umbi menggala/enau Rp. 1.000 / 2.500 s/d Rp. 10.000
15. Nangka Rp. 5.000 / 2.500 s/d Rp. 10.000
16. Cempedak Rp. 5.000 / 10.000 s/d Rp. 25.000
17. Asam manggala Rp.10.000/ 20.000 s/d Rp. 50.000
18. Asam biasa/sejenis Rp. 5.000/ 10.000 s/d Rp. 25.000
19. Sahang Rp. 5.000/ 15.000 s/d Rp. 35.000
20. Petai Rp. 25.000/75.000 s/d Rp.100.000
21. Sistem adat padi dari yang baru tanam sampai yang berbuah
nilai adatnya yang merusak 1 buah tempayan alam Rp.
100.000 + babi dan ayam serta anjing dan lain-lain.
22. Maradug dan tebu Rp. Tebu 2500. Maradug, Rp. 25.000
23. Pepaya dan sirih Rp. 1.000 s/d Rp. 5.000
24. Pinang dan pandan wangi nilai rata-rata sama Rp. 20.000

25. Tampau dan jambu nilai rata-rata sama Rp. 75.000
26. Apokat, dan kapuk nilai rata-rata sama Rp. 50.000
27. Tahakng dan sangkuhum nilai rata-rata sama Rp. 25.000
28. Nanas dan rotan nilainya rata-rata sama Rp 25.000
29. Sedangkan yang lain-lain, cabe, perangi, kunyit, jahe dapat dikenakan hukum adat.

4.3.3. Tata Guna Kawasan Adat Di Kecamatan Sanggau Ledo.

Masyarakat adat mempunyai konsep wilayah adat dengan sebutan yang berbeda-beda di masing-masing daerah. Dalam wilayah adat itu masyarakat adat yang otonom mengaturnya. Tata guna kawasan adat pada masyarakat adat Kabupaten Bengkayang khususnya Kecamatan Sanggau Ledo yang masih ada sampai saat ini hak atas tanah yaitu tanah yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat atau orang perseorangan dalam suatu wilayah yang dilindungi oleh hukum adat, dimana ketergantungan kehidupan masyarakat tersebut secara turun-temurun yang meliputi:

1 Hutan cadangan adat

Masyarakat sebalos dan minso telah lama mempraktekkan kawasan konservasi pencadangan hutan kawasan adat. Ciri dari kawasan ini adalah bukit atau gunung yang di dalamnya terdapat banyak tanaman obat-obatan, tanaman langka, banyak binatang, sungainya masih banyak ikan, dan terdapat aneka bahan untuk

bangunan. Kawasan tersebut telah ditetapkan dan diwariskan secara turun temurun.

Kawasan hutan cadangan dipersiapkan masyarakat adat sebagai kawasan penyangga air dan hutan cadangan yang kelak dapat dimanfaatkan untuk masyarakatnya dari generasi ke generasi. Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan tersebut dikontrol masyarakat. Ada aturan-aturan yang telah disepakati bersama jika akan mengambil hasil hutan di kawasan jenis ini, misalnya boleh mengambil kayu belian (kayu besi) dari kawasan hutan cadangan tetapi hanya untuk kebutuhan pembuatan rumah sendiri bukan untuk diperjual-belikan.

2 Tembawang (kebun buah-buahan).

Pengelolaan tembawang juga merupakan contoh pengelolaan sumber daya alam masyarakat adat dayak.

Ciri khas kawasan ini adalah jika di sana terdapat pecahan kaca, piring, mangkok dan tempayan di sekitarnya, ini bertanda bahwa tempat itu pernah didiami oleh orang atau masyarakat 10 – 20 tahun lalu, oleh karena musibah atau penyakit maka mereka sekampung pindah ke tempat lain. Tempat asal mereka yang telah ditanami buah-buahan kemudian dijadikan tembawang yang dimiliki oleh orang sekampung. Masyarakat dan anak cucunya hanya berhak menikmati buah-buahan dan tembawang tersebut tidak dapat dimiliki oleh perorangan.

Ciri lain adalah di kawasan ini terdapat berbagai jenis tanaman buah-buahan dan tanaman lain seperti durian, rambutan, duku, belimbing, langsung, pinang, kelapa, sirih dan lain-lain.

Meskipun tidak didiami dan ditunggu oleh warga, baik perorangan maupun suatu komunitas, tetapi tetap dipelihara dan dijaga. Kepemilikan kawasan tembawang sangat jelas yang diperkuat dengan bukti sejarah. Sebagai contoh tembawang X disebut tembawang Nek guruh. Nama itu diingat dan diwariskan dari generasi-kegenerasi. Dengan demikian baik komunitas setempat maupun di luar komunitasnya dapat mengetahui siapa pemilik tembawang tersebut.

Nilai sosial dari tembawang adalah adanya hak bersama dan kepemilikan kolektif. Meskipun suatu tembawang ada yang memiliki, tetapi siapa saja boleh mengambil buah dan berbagai jenis manfaat di dalamnya asal memberi tahu. Mengambil hanya untuk di makan dan tidak boleh untuk dieksploitasi dan diperdagangkan.

Nilai budaya dari tembawang dapat dilihat jika mengadakan upacara adat berupa sesajen. Sebagian besar perlengkapan/bahan baku pelaksanaan upacara adat, budaya dapat dengan mudah dicari di tembawang. Daun, kulit, akar, daging, buah, warna dari jenis tanaman tumbuh tersebut

digunakan berdasarkan kebutuhan dan upacara apa yang hendak dilakukan.

3 Tanah panyugu.

Masyarakat adat dayak memiliki tempat keramat tempat orang dayak berdoa kepada Tuhan. Tempat-tempat seperti ini dipelihara dan dihormati oleh warga masyarakat adat, dengan tidak melakukan kegiatan penebangan atau berladang di sekitar kawasan tersebut. Upacara ritual adat dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali setahun di tempat keramat seperti di sungai maupun didaratan.

4 Tanah Parene'an (parenekan).

Tanah yang berasal dari nenek moyangnya, diperoleh dengan cara membuka hutan untuk berladang pertama kali. Tanah parenekan tidak dapat dipindah tangankan. Tanah parenekan untuk disertifikatkan boleh saja tetapi harus seizin keluarga yang lain. Dalam hak parenekan ada yang berasal dari bekas rumah, tembawang yang tidak bisa dimiliki individu, namun menjadi milik bersama keturunan-keluarga itu. Ada tanah parene'an (parenekan) yang tidak dibagi yaitu kompokng (tembawang kecil) dan tidak bisa dimiliki individu tetapi diserahkan kepada penunggu pangkalan (pangkalatn). Dengan demikian perkembangan jaman ada anggota keluarga itu yang

tinggal di tempat terpisah, mereka hanya berhak memanfaatkan saja, tidak berhak memiliki tanah perenakan.

Tembawang tidak dapat disertifikatkan kecuali ada kesepakatan dari keluarga besar dan karena tembawang banyak berasal dari membuka hutan yang dilakukan nenek moyangnya sendiri.

4.4. KONVERSI HAK MILIK ADAT SESUAI DENGAN UUPA

4.4.1. Hak Milik Adat Sebelum Konversi

Konversi hak-hak atas tanah adalah penyesuaian status hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA menjadi hak-hak atas tanah yang ditetapkan dalam UUPA.

Dasar hukum diadakan konversi hak milik adat diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ada ketentuan Konversi UUPA Diktum II. Dasar Hukum konversi hak milik adat yang jenis haknya dapat dikonversi menjadi hak milik Pasal 20 (1) UUPA diatur dalam Pasal II dan VII ketentuan konversi. Pasal II ketentuan konversi UUPA mengatakan:

- (1) Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) seperti yang tersebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini yaitu hak agrarisch eigendom, milik yayasan andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, penisi, grant sultan, Landerijenbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama, apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini menjadi hak milik tersebut dalam**

pasal 20 ayat 1, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21.

- (2) Hak-hak tersebut dalam ayat (1) kepunyaan orang asing, warganegara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing dan badan hukum yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) menjadi hak guna usaha atau hak guna bangunan sesuai dengan peruntukan tanahnya sebagai yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Selain yang diuraikan dalam Pasal II tersebut maka tanah-tanah dengan hak adat yang ada pada saat mulai berlakunya UUPA yang memberi kewenangan mirip atau hampir sama dengan kewenangan yang ada pada hak milik yang diatur dalam Pasal 20 (1), maka sejak berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960 menjadi hak milik dengan catatan subyek haknya pada tanggal 24 September 1960 memenuhi syarat sebagai hak milik seperti diatur dalam Pasal 21 UUPA syaratnya yaitu warga negara Indonesia Tunggal, apabila subyeknya badan hukum, harus merupakan badan hukum yang ditetapkan pemerintah yang dapat mempunyai hak milik.

Bagi tanah hak adat yang wewenangnyanya mirip atau hampir sama dengan hak milik menurut UUPA, yang ada pada saat mulai berlakunya UUPA, No 5 Tahun 1960 yang tidak memenuhi syarat sebagai subyek hak milik, maka hak atas tanah adat yang dipunyainya itu menurut Pasal II ketentuan konversi tidak dikonversi menjadi hak milik tetapi dikonversi menjadi hak guna bangunan atau hak guna usaha sesuai dengan peruntukannya.

Secara garis besar konversi hak atas tanah dapat digolongkan atas dua bagian yaitu:

(1) Konversi bekas hak barat.

Pelaksanaan diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1962 tentang pelaksanaan ketentuan UUPA. Adapun tanah bekas hak barat yang di konversikan ialah:

- a. Hak eigendom.
- b. Hak opstal dan erfacht.
- c. Hak consessie dan sewa.
- d. Hak gebruk dan uruchtgebruik.

(2) Konversi bekas hak milik adat.

Pelaksanaanya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pertanian Agraria No. 2 tahun 1962 tentang penegasan konversi dan pendaftaran hak-hak Indonesia atas tanah dalam Pasal 1 disebutkan atas permohonan yang berkepentingan, maka konversi hak-hak yang disebut dalam Pasal II dan VII ketentuan konversi UUPA menjadi hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai dapat ditegaskan menurut ketentuan-ketentuan peraturan ini dan didaftar menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka untuk pelaksanaan konversi diperlukan suatu penegasan macam haknya dan subyek haknya sebab hak yang lama dapat dikonversi setelah ada kepastian

hak yang akan dikonversi, serta subyek haknya. Maka jelas penegasan tentang jenis hak milik adat diperlukan penegasan tentang konversi hak tersebut menjadi hak apa, setelah itu baru dapat dilakukan pendaftaran untuk pelaksanaan pendaftaran harus sesuai dengan ketentuan PP 24 tahun 1997.

Sebelum UUPA, menurut hukum adat hak milik atas tanah dapat diperoleh dengan jalan:

- a. Membuka hutan atau tanah belukar.
- b. Warisan nenek moyang.
- c. Menerima tanah karena pembelian.

Kecamatan Sanggau Ledo cara memperoleh hak milik atas tanah menurut hukum adat hanya dikenal dengan cara menerima tanah dengan membuka hutan, jual beli, warisan nenek moyang sedangkan memperoleh tanah tersebut di atas banyak dengan cara membuka hutan biasanya dengan permohonan sertifikatnya bukan tanah milik adat melainkan tanah negara.

Kecamatan Sanggau Ledo pada awalnya adalah hutan belantara yang masih kosong. Suburnya tanah disitu sehingga banyak masyarakat yang berpindah ke Sanggau Ledo untuk bercocok tanam dengan menanam palawija, karet, lada.

Masyarakat disana pada awalnya didominasi etnis Dayak dan etnis Tionghoa. etnis Tionghoa sebagian besar menempati daerah pantai dan sebagian lagi di daerah pedalaman. Sejak peristiwa Pergerakan

Rakyat Serawak (PGRS) Perlawanan Rakyat Kalimantan Utara (PARAKU) pada tahun 1968 itu mereka banyak mengungsi ke daerah pantai karena diusir dari pedalaman.

Hal lain yang menarik sebelum terjadi Peristiwa itu banyak tanah-tanah di Sanggau Ledo dimiliki oleh masyarakat Tionghoa. Sejak terjadi konflik banyak warga Tionghoa diusir ke kota oleh tentara dan warga masyarakat karena dituding sebagai anggota Pergerakan Rakyat Serawak (PGRS). Pengungsian warga Tionghoa ini meninggalkan tanah-tanah dan kebun-kebun yang sudah dikerjakan sehingga tanah dan kebun itu ada yang dikuasai oleh Dayak, etnis Madura dan menjadi tanah-tanah kosong yang kemudian menjadi hutan yang penuh dengan tanaman buah-buahan yang sekarang ini banyak diklaim menjadi tanah adat berupa tembawang.

Keberadaan etnis Madura di Sanggau Ledo karena masalah ekonomi, dimana pulau Madura dikenal sebagai daerah gersang dan tandus serta pencarian nafkah sangat terbatas. Kondisi ini membuat mereka harus keluar mencari nafkah ke tempat-tempat yang masih biasa diakses seperti ke Kalimantan Barat. Mereka datang mengikuti keluarganya sekitar awal 1902 sampai 1945 dan lama-lama makin banyak di Kalimantan Barat.

Di Kabupaten Sambas orang Madura diperkirakan mencapai 20.000 jiwa atau 3,3 % dari penduduk sebesar 601.831 jiwa. Mereka

berada di Kecamatan Singkawang 3,1 %, Tebas 6,3 %, Sanggau Ledo 8 %, Sambas 0,8 %, Jawai 4,4 %, Pemangkat 2,3 %, Sungai Raya 4 % dan Sekadau 5 %.⁵⁰ Sejak terjadi Konflik etnis Madura-Dayak 1997 banyak tanah-tanah orang madura yang ditinggalkan dikuasai masyarakat setempat dan ada tanah orang madura yang sempat dijual walaupun dengan harga yang murah. Hal ini dikarenakan masyarakat etnis madura tidak boleh kembali menguasai tanah-tanahnya.

Pada awal sejarahnya di Kecamatan Sanggau Ledo sudah mengenal pemerintah desa sebelum berlakunya UU No 5. Tahun 1975 tentang Pemerintahan Desa yang disebut dengan istilah Binua. Sebuah binua dipimpin oleh Kepala binua disebut Singa. Berdasarkan Ketetapan Musyawarah Adat Dayak Nomor: II MUSDAT.I/BKY/6/1986 bahwa pengertian Kepala Binua adalah seorang yang dipilih oleh para pasirah dan kepala binua berasal dari salah seorang pasirah di suatu desa. Sedangkan pasirah adalah seseorang yang dipilih oleh masyarakat di dalam kampung/desanya yang diangkat atas usul kepala binua oleh ketua adat. Pada waktu itu di Kecamatan Sanggau Ledo telah ada 2 binua yaitu binua riok dan benua sara. Masing-masing binua dipimpin oleh kepala binua yang membawahi beberapa kampung/desa.

⁵⁰ Edi Patebang, Konflik Etnis Di Sambas, Institut Studi Arus Informasi, 2001.

Tanah milik adat pada awalnya berupa tanah parene'an (parenekan) di dapat jika seorang membuka hutan pertama kalinya. Tanah parene'an akan dikuasai pada seluruh ahli waris yang masih memiliki hubungan keluarga. Tanah hasil membuka hutan itu kemudian dikerjakan secara terus-menerus oleh mereka bertempat tinggal disitu dan beranak cucu. Sehingga membentuk satu kampung dan biasa satu kampung itu menjadi keluarga besar serta mempunyai hubungan darah dari satu nenek moyang.

Tanah parene'an tidak dapat dipindahtangankan, jika ingin disertifikatkan menjadi hak milik perseorangan harus mendapat izin dari keluarga-keluarga lainnya. Tanah parene'an bisa tidak akan dibagi jika tanahnya kecil tetapi diserahkan pada penunggu pangkalan (pangkalatn). Mereka hanya berhak memanfaatkan saja, tidak berhak memiliki tanah parene'an. Tanah parene'an yang sudah dikuasai perorangan biasanya jarang disertifikatkan karena tidak ada alat buktinya dan masih kuatnya adat istiadat sehingga jika terjadi sengketa mereka akan menyelesaikan menurut hukum adat yang berlaku di daerah itu. Jika hak komunalnya sudah lemah maka tanah parene'an yang sudah dibagi-bagi dapat dimiliki individu/perseorangan akan tetapi masyarakat tidak mau mensertifikatkan hal itu dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 12
Tanah Milik Adat Yang Sudah Dimiliki Perseorangan
Apakah Disertifikatkan

No	Keterangan	Responden	Prosentase
1	Secara langsung di sertifikatkan.	8	13,33 %
2	Tunggu beberapa bulan atau tahun baru disertifikatkan	5	8,33 %
3	Tidak disertifikatkan sama sekali	44	73,33 %
4	Disertifikatkan apabila ingin di jual	3	5 %
Jumlah		60	100 %

Sumber: Data Primer 2002

Alasan masyarakat tidak mensertifikatkan tanahnya karena biarpun tanah tersebut sudah dimiliki perseorangan tetapi tanaman dan buah-buahan yang ada di dalamnya tetap milik keluarga besarnya. Hal ini dikarenakan tanaman yang ada itu ditanam oleh nenek moyang mereka, sehingga menurut aturan hukum adatnya semua kerabat berhak menikmatinya. Penentuan batasnya biasanya berupa tanaman hidup, sehingga suatu hari batas tersebut bisa berubah karena pohon itu mati atau karena disekitarnya tumbuh tanaman yang sama. Akibatnya dikemudian hari jika tanah itu akan disertifikatkan sulit menentukan batasnya. Selain itu pensertifikatan harus mendapat persetujuan seluruh anak cucu dan kerabatnya karena dianggap tanah itu tanah parene'an dan semua turunannya berhak menikmati dan mengambil manfaat dari tanah itu..

4.4.2. Hak Milik Adat Sesudah Konversi.

Subyek hak milik atas tanah dengan berlakunya UUPA, mengenai terjadinya hak milik atas tanah diatur Pasal 2, yang menyebutkan:

1. Terjadi hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Selain menurut cara disebut dalam ayat (1) hak milik terjadi karena:
 - a. Penetapan Pemerintah menurut cara-cara dan syarat-syarat Peraturan Pemerintah.
 - b. Ketentuan Undang-Undang.

Pengertian hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 ayat 1 yang menyebutkan hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6.

Selain sifat hak milik yang telah di sebutkan, hak milik juga harus mengingat fungsi sosial seperti disebutkan Pasal 6 UUPA. Artinya bahwa semua hak atas tanah termasuk juga hak milik atas tanah dalam penggunaannya tidak boleh semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi pemilik tanah, apalagi sampai menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifatnya, sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan kebahagiaan masyarakat dan negara. Namun demikian

ketentuan ini tidak berarti kepentingan perseorangan akan terdesak oleh kepentingan bersama melainkan kepentingan bersama dan kepentingan perorangan haruslah seimbang sehingga akan tercapai tujuan yang dimaksud.

Mengenai subyek hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 21 ayat 1 UUPA yang menyebutkan hak warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik, artinya bahwa hak milik atas tanah pada dasarnya hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan tidak dapat dibedakan antara WNI asli ataupun turunan dan menurut Pasal 9 ayat 2 tidak membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Bila dikaitkan dengan Pasal 21 ayat (4) maka untuk dapat mempunyai hak milik atas tanah hanya warga negara Indonesia tunggal.

Selanjutnya Pasal 21 ayat 2 menyebutkan bahwa oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut oleh Pemerintah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.

Adapun badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah adalah:

1. Badan-badan yang didirikan oleh negara.

2. Perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 79 Tahun 1953.
3. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Agama.
4. Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.

Dalam hukum adat yang dapat mempunyai hak milik atas tanah adalah warga persekutuan hukum yang juga seorang warga negara Indonesia, hal ini sama seperti subyek hak milik atas tanah menurut UUPA.

Khususnya di Kecamatan Sanggau Ledo yang berhak menjadi subyek hak milik atas tanah adalah anggota persekutuan hukum. Persekutuan hukum di Sanggau Ledo adalah kerabat, yang berhak menjadi subyek hak milik hanya anggota kerabat. Hal ini bukan berarti masyarakat luar anggota kerabat tidak dapat mengambil manfaat tanah yang berada di wilayah itu. Orang lain yang bukan anggota kerabat dapat mengambil manfaat di wilayah itu manakala yang bersangkutan tinggal di wilayah kerabat tersebut dengan cara menyewa tanah. Sistem bagi hasil serta penggunaan tanah ulayat harus melapor atau memberitahukan kepada ketua adat yang disertai pembayaran berupa uang yang menjadi kas adat. Dengan demikian warga pendatang hanya sebatas mengelola atau mengambil manfaat tanah semacam ini sesuai dengan ketentuan

hukum adat. Salah satu ciri pokok hak ulayat yang mengatakan bahwa orang asing hanya diperkenankan mengambil manfaat dari hak purba dengan izin kepada persekutuan hukum disertai pembayaran kepada persekutuan hukum.

Di Sanggau Ledo dikenal apa yang disebut tanah parene'an (parenekan) dan tembawang yaitu tanah ulayat yang dimiliki oleh keluarga besar atau turunan nenek moyangnya (kerabat) yang dikepalai oleh ketua adat. Tanah ulayat itu dapat dimanfaatkan oleh warga persekutuan dan orang di luar persekutuan dengan ijin ketua adat. Sebaliknya, warga memberikan uang sebagai kompensasi kepada ketua adat yang sudah menjual atau mewariskan tanah ulayat tersebut. Jual beli yang dilakukan oleh warga sebagian besar dilakukan di bawah tangan, pembeli menerima kuitansi yang dibuat oleh ketua adat. Warga yang menerima melalui warisan memiliki surat keterangan waris yang dibuat oleh kepala desa setempat yang mengatakan bahwa ahli waris yang tersebut namanya adalah bernama ahli waris yang sah.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Pertanian Agraria No. 2 tahun 1962 hak kerabat akan dikonversi menjadi hak milik. Para pemilik tanah kerabat yang memperoleh tanah karena warisan atau jual beli hanya menunjukan alat bukti berupa kwitansi. Padahal kwitansi bukan merupakan alat bukti yang sah untuk kepemilikan tanah oleh karena itu sesuai dengan ketentuan

Peraturan Menteri Pertanian Agraria No. 2 tahun 1962 para pemilik tanah warga tersebut seharusnya segera mengkonversi tanah adatnya.

4.4.3. Tata Cara Konversi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Agraria No 2 tahun 1962 untuk konversi hak milik adat harus ada permohonan dari yang berkepentingan kepada kepala kantor pertanahan. Permohonan konversi dibedakan menjadi 2 yaitu permohonan konversi yang sudah ada surat hak (penegasan) dan permohonan konversi yang tidak diuraikan dalam surat hak (pengakuan).

Persyaratan mengajukan permohonan pensertifikatan hak atas tanah kepada kepala kantor pertanahan dengan cara:

1. Pengakuan konversi tanah milik adat
 - a. Foto copy yang masih berlaku dan dilegalisasi oleh kepala desa.
 - b. Permohonan dari pemilik tanah.
 - c. Surat keterangan dari kepala desa tentang kepemilikan tanah yang dimohon.
 - d. Surat kepemilikan/penguasaan tanah oleh pemohon bernominal Rp. 6.000.
 - e. Foto copy pelunasan pajak bumi dan bangunan terakhir.

2. Penegasan konversi hak milik adat.

1. Pewarisan.

1. Surat kematian.
2. Foto copy kartu tanda penduduk yang masih berlaku para ahli waris dan para saksi dan dilegalisasi kepala desa.
3. Surat keterangan dari desa tentang kepemilikan/penguasaan tanah yang dimohon.
4. Surat pernyataan kepemilikan/penguasaan tanah oleh pemohon bermeterai Rp. 6.000.
5. Surat pernyataan yang dibuat oleh ahli waris bermeterai Rp. 6.000. disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh kepala desa setempat.
6. Foto copy surat ketetapan tanah/pelunasan pajak bumi dan bangunan terakhir.
7. Bukti setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2. Jual-beli.

- a) Foto copy kartu tanda penduduk atas nama penjual dan pembeli yang dilegalisasi kepala desa.

- b) Surat keterangan kepemilikan/penguasaan tanah dari kepala desa.
- c) Surat pernyataan kepemilikan/penguasaan tanah dari pemilik tanah atau yang berkepentingan bermeterai Rp. 6.000.
- d) Bukti-bukti peralihan akta jual-beli dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- e) Foto copy surat penetapan pemilikan tanah/pelunasan pajak bumi dan bangunan.
- f) Bukti setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

3. Hibah.

- a) Foto copy kartu tanda penduduk atas nama pemberi dan penerima hibah yang dilegalisasi kepala desa.
- b) Kutipan putusan desa atau foto copynya yang diregister dan dilegalisasi.
- c) Bukti peralihan dengan akta hibah dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- d) Surat pernyataan hibah disahkan Kepala desa.
- e) Persetujuan dari isteri/suami pemberi hibah dan anak-anaknya, bermeterai Rp. 6000 dan diketahui kepala desa.

f) Pernyataan pemberi hibah bermeterai Rp. 6.000 bahwa nilai harta yang dihibahkan kurang 1/3 dari seluruh harta yang dimiliki dan diketahui kepala desa.

g) Foto copy surat penetapan pemilikan tanah atau pelunasan pajak bumi dan bangunan yang terakhir.

h) Bukti setor bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Kewenangan dan tata cara pemberian permohonan hak tanah Negara. Pemohon memohon jenis hak milik, hak guna bangunan, Hak pakai, hak pengelolaan.

1 Permohonan diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

a. Mengisi formulir permohonan dan kelengkapannya.

b. Membayar biaya Panitia "A".

c. Membayar panjar biaya pengukuran.

2 Panitia "A".

Pemeriksaan tanah dan sidang Panitia "A".

3 Proses.

- Risalah pemeriksaan tanah "A".

- Surat ukur.

4 Kewenangan penerbitan surat keputusan Hak

a. Kanwil Badan Pertanahan Nasional.

1) Hak milik.

Luas lebih 2 ha untuk tanah pertanian.

Luas tidak lebih dari 5 000 M2 untuk perumahan.

2) Hak Guna Bangunan.

Luasnya tidak lebih dari 15 ha.

3) Hak pengelolaan.

Luasnya lebih dari 2 ha untuk tanah pertanian.

Luasnya tidak lebih 15 ha non pertanian

b. Kantor pertanahan.

1) Hak milik.

Luasnya tidak lebih dari 2 ha untuk pertanian.

Luas tidak lebih 2000 M2 untuk non pertanian.

2) Hak guna bangunan.

Luas tidak lebih dari 2000 M2.

3) Hak pengelolaan

Luas tidak lebih 2 ha untuk pertanian.

Luas tidak lebih 2000 M2 untuk perumahan.

5 Surat keputusan pemberian Hak.

6 Sertifikat.

Pemohon memohon jenis hak guna usaha (HGU) maka syaratnya yaitu:

a. Permohonan diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional dengan mengisi persyaratan

1) Mengisi formulir permohonan dan kelengkapannya.

2) Membayar biaya panitia "B".

3) Membayar biaya Aspek PGT.

- 4) Membayar biaya Pengukuran.
- b. Panitia B memeriksa tanah dan sidang panitia B.
- c. Proses
 - Risalah pemeriksaan tanah B.
 - Sidang Panitia B.
- d. Wewenang Penerbitan Surat Keputusan Hak.
 - 1) Badan Pertanahan Nasional Pusat.
Hak Guna Usaha luasnya > 200 ha.
 - 2) Kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional.
Hak guna usaha luasnya < 200 ha.
- e. Surat keputusan pemberian hak.
- f. Sertifikat.

Daftar permohonan daftar isian 201 yang telah ditandatangani panitia, dikirimkan kembali kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dengan nota dinas untuk diumumkan selama 60 hari di kantor pertanahan dan kantor kepala desa/kelurahan letak tanah. Apabila ada bantahan atau sanggahan yang disampaikan selama pengumuman oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran tanah dicantumkan dalam kolom IV di 201 (daftar isian).

Apabila bantahan atau sanggahan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kepada pihak yang mengajukan bantahan atau sanggahan disampaikan pemberitahuan tertulis dan gugatan ke pengadilan. Bila keberatan mengenai data fisik dalam arti keberatan terhadap batas-batas tanah atau letak tanah dan keberatan itu dapat diselesaikan, maka penyelesaiannya dituangkan dalam risalah penyelesaian sengketa. Apabila ada sengketa dan pihak yang keberatan diberitahukan supaya mengajukan gugatan ke pengadilan dalam jangka waktu 90 hari, jika tidak akan hapus dan catatan pada halaman sebab perubahan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan setelah lewat waktu gugatan tak disampaikan ke pengadilan.

Pihak yang berwenang menandatangani buku tanah dan sertifikat adalah kepala kantor pertanahan atau pejabat yang ditunjuk. Sedangkan yang berwenang menandatangani surat ukur dalam pembuatannya kepala seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk. Sertifikat diterbitkan terhadap bidang tanah yang sudah didaftar dalam buku tanah. Sertifikat diserahkan kepada pemegang hak atau kuasanya yang dibuat secara tertulis. Agar sertifikat yang sudah diterbitkan segera diterima oleh yang berhak, maka kepala kantor pertanahan membuat daftar penyelesaian sertifikat dan dimuat pada papan pengumuman yang mudah dapat dibaca oleh pemohon.

Apabila dalam jangka waktu 7 hari pemohon belum mengambil sertifikat, maka kepala kantor pertanahan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pertanahan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemohon tentang telah diterbitkannya sertifikat dan segera diambil di Kantor Pertanahan.

4.4. FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN KONVERSI HAK MILIK ATAS TANAH ADAT DI KECAMATAN SANGGAU LEDO.

4.5.1. Kepemilikan Tanah.

Untuk mengetahui ada tidaknya bukti pemilikan tanah responden dapat di lihat pada tabel 12 di bawah ini.

Tabel 12
Kepemilikan Tanah

No	Keterangan	Responden	Prosentase
1	Hak milik ada alat bukti.	8	13,3 %
2	Tidak ada bukti	52	86,7 %
	Jumlah	60	100

Sumber: Data primer Kecamatan Sanggau Ledo tahun 2002.

8 responden atau 13,3 % sudah memiliki sertifikat berarti ia sudah mengkonversi, tanahnya berasal dari jual beli sebanyak 3 orang dan 5 orang berasal dari tanah adat. Dengan mata pencaharian pegawai negeri, pedagang dan petani yang pola kehidupannya sudah maju.

52 responden atau 86,7% tidak mempunyai alat bukti mengenai tanahnya yang berarti belum mengkonversi tanahnya. Alasan masyarakat tidak mengkonversi tanah milik adatnya disebabkan mereka belum mengerti pentingnya sertifikat, tidak mengenal alat tulis-menulis, dan masih kuatnya hukum adat. Apabila terjadi sengketa mengenai tanah milik

adat, masyarakat menganggap hukum adat masih dapat menyelesaikannya.

4.5.2. Alasan Mengkonversi Hak milik adat.

Alasan responden sudah mengkonversi hak milik adat dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 13
Alasan Mengkonversi Hak Milik Adat

No	Alasan	Responden	Prosentase
1	Jual- beli.	37	61,7 %
2	Untuk angunan di bank.	9	15 %
3	Harga tinggi.	4	6,6 %
4	Kesadararan akan pentingnya sertifikat	10	16,7 %
	Jumlah	60	100

Sumber: Data primer Kecamatan Sanggau Ledo tahun 2002

1. Jual beli.

Sebanyak 37 responden atau 61,7% yang mengajukan konversi hak milik adat karena mereka ingin melakukan jual beli. Sebab dengan sertifikat pembeli merasa haknya akan terjamin bahwa tanah tersebut tidak dikuasai oleh keluarga besarnya melainkan menjadi milik pribadi. Berdasarkan pengalaman bahwa bila tanah dijual tidak mempunyai alat bukti, suatu ketika kerabatnya/keluarga yang tidak mengetahui bahwa tanah itu dijual akan menuntut tanah itu kepada pembeli dengan alasan

tanah itu adalah tanah adat yang apabila dijual harus mendapat persetujuan seluruh kerabatnya.

2. Anggunan bank (9 responden atau 15 %).

9 responden yang mengajukan konversi hak milik adat bermata pencarian sebagai pedagang (5 orang), sebagai pegawai negeri (3 orang), sebagai petani yang kehidupannya sudah maju (1 orang) terdapat di desa Lembang dan dengan tingkat pendidikan responden D3/S1 (1 orang) lulusan SLTA (5 orang) dan lulusan SLTP (3 orang).

Alasan responden mengajukan konversi hak milik adat karena sertifikat tanah itu dapat dijadikan jaminan hutang atau angunan di bank

3. Harga jual tinggi (4 responden atau 6,6 %).

Responden yang telah mengkonversi hak milik adatnya berpendidikan SLTP mereka bermata pencarian sebagai petani (4 orang). Walaupun tingkat pendidikan mereka rendah tetapi karena pergaulan mereka luas maka mereka mengetahui bahwa dengan dimilikinya sertifikat hak milik atas tanah yang mereka miliki akan memiliki harga jual yang tinggi bila pada suatu saat di jual.

4. Kesadaran akan arti pentingnya sertifikat. (10 responden atau 16,7 %)

Sebanyak 10 responden yang telah mengajukan konversi hak milik adat berpendapat bahwa mereka menyadari arti penting sertifikat sebagai tanda bukti hak milik atas tanah yang kuat. Tingkat pendidikan responden dalam hal ini adalah lulusan D3/S1 (3 orang), lulusan SLTA 6 orang serta

1 orang bermata pencarian sebagai petani sukses yaitu petani yang berkedudukan sebagai petani pemilik tanah dan kehidupan telah maju.

Dari tabel 13 di atas alasan-alasan responden mengajukan konversi hak milik adatnya, dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan yang dikemukakan responden yaitu karena mereka menyadari arti pentingnya sertifikat, mereka mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu untuk mereka mengetahui.

4.5.3. Alasan Belum mengkonversi Hak Milik Adat.

Alasan-alasan belum mengajukan konversi hak milik adat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14
Alasan Belum Mengkonversi Hak Milik Adat

No	Alasan-Alasan	Responden	Prosentase
1	Tidak tahu.	6	10 %
2	Belum perlu	4	6,7 %
3	Prosesnya lama dan jaraknya jauh	27	45 %
4	Biaya mahal	23	38,3 %
	Jumlah	60	100

Sumber: Data primer 2002.

1. Tidak tahu (6 responden atau 10%).

Dari 60 responden yang belum mengkonversi hak milik adat ada 6 responden atau 10 % menyatakan tidak tahu/tidak pernah mendengar adanya konversi hak milik adat. Tingkat pendidikan responden dalam hal ini tidak sekolah dan mereka bermata pencarian sebagai petani. Jika

mereka mengajukan sertifikat status tanah yang dimohonkan hak milik adalah tanah negara bukan tanah milik adat. Hal ini dikarenakan tidak tahunya masyarakat dan tidak ada buktinya. Sehingga biasanya masyarakat mengajukan permohonan sertifikat hak milik statusnya tanah negara, akibatnya masyarakat harus membayar biaya kepada negara atas permohonan tanah tersebut. Apabila ia mengajukan permohonan sertifikat adalah tanah milik adat maka ia tidak perlu biaya ganti rugi atas tanah negara.

Kepala kantor pertanahan maupun Kepala Sub Seksi Pengukuran, Pemetaan dan Konversi dalam menanggapi jawaban responden yang menyatakan tidak tahu/tidak pernah mendengar mengenai konversi hak milik adat menyatakan bahwa alasan tersebut mendasar karena penyuluhan yang sering diadakan biasanya mengenai hukum pada umumnya.

Dalam hal ini walaupun responden menyatakan bahwa mereka belum pernah mendengar atau tidak tahu mengenai konversi seharusnya aparat kantor pertanahan tidak tinggal diam dan mengatakan bahwa hal itu wajar saja. Seharusnya aparat kantor pertanahan segera memikirkan bagaimana caranya agar masyarakat yang tidak tahu dan tidak mengerti itu jadi mengerti, karena peraturan tentang konversi sudah berlaku lama yaitu sejak tanggal 1 Juni 1964.

2. Belum perlu (4 responden atau 6,7 %).

Dalam hal ini yang beranggapan bahwa mereka merasa belum mempunyai kepentingan untuk menggunakan sertifikat ada 4 responden

atau 6,7 %. Menurut responden belum perlunya mereka mengurus permohonan sertifikat di karenakan mereka akan menjual tanah peninggalan nenek moyangnya sehingga dengan bukti surat keterangan tanah dari Kepala Desa dan kuitansi surat jual beli dirasa sudah cukup.

Disamping itu masih banyak masyarakat menyelesaikan sengketa dengan hukum adat apabila terjadi sengketa. Hal itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 15
Apabila Terjadi Sengketa Tanah
Maka Penyelesaiannya

No	Keterangan	Responden	Prosentase
1	Musyawarah yang bersengketa.	24	40 %
2	Gugatan kepengadilan	0	0
3	Hukum adat	35	58,3 %
4	Ganti rugi	1	1,7 %
	Jumlah	60	100

Sumber: Data primer Kecamatan Sanggau Ledo tahun 2002.

Dari tabel di atas 35 responden atau 58,3 % masih menjunjung tinggi dan menghormati cara penyelesaian menggunakan hukum adat setempat. Masyarakat menganggap hukum adat cara yang mudah dan cepat dalam penyelesaian masalah walaupun hal itu tidak efektif. Sebab hukum adat bentuknya tidak tertulis sehingga apabila terjadi sengketa dan telah didamaikan suatu ketika akan terulang lagi

Kepala kantor pertanahan berpendapat meskipun beranggapan bahwa mereka belum memerlukan sertifikat, namun harus tetap mengingat bahwa hal itu akan merugikan mereka sendiri bila mereka mengalami masalah tentang tanahnya dan mereka tidak memiliki alat bukti yang kuat. Dalam hal ini seharusnya pemerintah setempat hendaknya lebih menggalakkan program penyuluhan hukum supaya masyarakat yang berpendidikan rendah mengerti akan hukum dan tahu akan arti pentingnya sertifikat tanah.

3. Proses lama dan jarak yang jauh (27 responden atau 45 %)

27 responden yang belum mengkonversi hak milik adatnya disebabkan karena menurut informasi dari masyarakat yang sudah mengkonversi hak milik adatnya, proses untuk mengkonversi memakan waktu yang lama yaitu lebih dari 1 tahun dan juga jarak yang jauh sehingga mereka enggan untuk mengajukan permohonan konversi.

Menurut keterangan aparat kantor pertanahan proses yang lama tersebut disebabkan tidak lengkapnya syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon karena mereka tidak mengurus sendiri sehingga mereka tidak mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan konversi.

Menurut keterangan aparat pertanahan, proses yang lama tersebut disebabkan tidak lengkapnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon karena mereka tidak mengurus sendiri sehingga tidak mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan

konversi. Jika syarat-syarat pengajuan konversi lengkap maka prosesnya akan selesai dalam jangka waktu 4 - 5 bulan.

Untuk kendala jarak yang jauh memang aparat kantor pertanahan mengakui bahwa kendala ini yang menjadi tantangan besar bagi mereka untuk melaksanakan konversi hak milik adat di Kecamatan Sanggau Ledo, karena selain Kabupaten Bengkayang merupakan kabupaten baru yang sebelumnya adalah Kabupaten Sambas. Dalam kenyataannya hingga sekarang segala sesuatunya masih menginduk pada Kabupaten Sambas. Selain jaraknya yang begitu jauh sehingga harus ditempuh 2 ½ jam perjalanan jika berkendara pribadi dan jika memakai kendaran umum bisa lebih dari 3 jam. Hal ini membuat masyarakat enggan untuk mengkonversi hak milik atas tanah adatnya.

Dalam hal proses yang lama dan jarak yang jauh hendaknya aparat kantor pertanahan mengadakan suatu upaya agar masyarakat datang sendiri ke kantor pertanahan dalam pengurusan konversi, misalnya dengan pemasangan pengumuman mengenai syarat-syarat, proses dan biaya dalam pengurusan konversi hak milik adat di Kabupaten Bengkayang khususnya di Kecamatan Sanggau Ledo sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi ke Kabupaten Bengkayang.

4. Biaya yang mahal. (23 responden atau 37,3%)

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat yang sudah mengajukan permohonan sertifikat dikatakan bahwa biaya untuk mengurus suatu sertifikat adalah relatif mahal diperkirakan biayanya di

atas Rp. 500.000, maka terdapat 23 responden atau 37,3% yang menyatakan bahwa biaya pengurusan konversi hak milik adat mahal.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Kepala Kantor Pertanahan biaya konversi tidak sebesar itu, karena biaya permohonan konversi hak milik adat berdasarkan Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 1992 yaitu

a. Biaya pendaftaran/pembuatan sertifikat (Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 1992).

- Jika tanah tersebut terletak di daerah perkotaan Rp. 10.000.
- Jika tanah tersebut terletak di luar daerah perkotaan Rp. 1.000.

b. Blanko sertifikat.

Untuk 1 sertifikat Rp. 1.000.

c. Biaya cetak lembaran isian permohonan sertifikat.

Untuk satu set Rp. 700.

d. Biaya pengukuran dan pemetaan.

Tergantung pada luas tanah dan biaya transport dari kantor pertanahan ke lokasi dan biaya pembuatan atau pemasangan patok batas pemilikan.

e. Surat keterangan tanah.

- Rp. 10.000 jika tanah yang bersangkutan terletak di daerah perkotaan.
- Rp. 1.000 jika tanah yang bersangkutan terletak di luar daerah perkotaan.

f. Kutipan gambar situasi.

- Rp. 10.000 jika tanah yang bersangkutan terletak di daerah perkotaan.
- Rp. 1.000 jika tanah yang bersangkutan terletak di luar daerah perkotaan.

Rincian biaya di atas belum termasuk biaya panitia A dan surat pengakuan hak. Jika dihitung berdasarkan permohonan-permohonan yang terdahulu maka biaya berkisar antara 150.000-175.000. Melihat kondisi sekarang ini biaya tersebut tidak sesuai lagi karena banyak perubahan biaya misalnya saja biaya untuk foto copy, alat tulis, transfort dan lain sebagainya. Biaya-biaya tersebut terus mengaju pada peraturan yang berlaku jadi meskipun biaya-biaya tersebut tetap mengaju pada peraturan yang berlaku, tapi bagi masyarakat biaya tersebut mungkin dirasa masih memberatkan dan tanpa mereka sadari bahwa biaya-biaya tersebut setiap tahunnya akan meningkat.

Menurut Kepala Kantor pertanahan mahal nya biaya pembuatan sertifikat ini juga karena biaya pengukuran dan akomodasi pegawai pertanahan ditanggung pemohon. Apabila tanahnya luas maka memakan waktu yang lama sehingga biaya lebih mahal. Sebab untuk mengukur sebidang tanah tiap orang memiliki luas tanah 1 hektar.

Luas bidang tanah yang dimiliki responden satu bidang tanah yang dimiliki dapat dilihat dapat tabel di bawah ini:

Tabel 16
Luas Satu Bidang Tanah Yang Dimiliki

No	Keterangan	Responden	Jumlah
1	Di bawah satu hektar.	7	11,7 %
2	Satu hektar.	20	33,3 %
3	Dua hektar.	18	30 %
4	Tiga hektar.	10	16,7 %
5	Di atas tiga hektar.	5	8,3 %
	Jumlah	60	100

Sumber: Data primer 2002.

Biasanya tanah-tanah yang luas itu di tanami tanaman-tanaman keras, karet atau durian sebagai tanda ada pemiliknya sehingga akan diadakan pengukuran untuk menentukan batas/patok yang satu dengan batas/patok yang lain aparat pertanahan harus membuat jalan perintis karena lokasinya masih berupa semak belukar dengan pohon-pohon tinggi. Hal ini membuat aparat pertanahan kerja ekstra keras sehingga biaya komodasi dengan sendirinya terasa lebih mahal.

Biaya pengurusan sertifikat ini mahal dikarenakan masyarakat yang memiliki tanah milik adat tetapi pada saat permohonan ke kantor pertanahan status tanah yang dimohon adalah tanah negara bukan tanah milik adat. Akibatnya masyarakat harus membayar biaya ganti rugi kepada negara.

Apabila masyarakat mengajukan permohonan statusnya tanah milik adat maka tidak ada biaya ganti rugi kepada negara.⁵¹

Mahalnya pengurusan permohonan konversi hak milik adat disebabkan juga banyaknya permohonan yang tidak datang sendiri atau tidak mau mengurus sendiri melainkan menyuruh orang lain atau bisa disebut calo sehingga mereka harus mengeluarkan uang tambahan untuk membayar calo yang datang meminta bayaran tinggi.

Untuk menghindari pemerasan-pemerasan yang dilakukan calo terhadap orang yang mengajukan permohonan konversi hendaknya aparat pemerintah menggalakkan prona, karena hal ini di rasa sangat membantu masyarakat yang tidak mampu dan yang malas mengurus sendiri. Dengan prona maka aparat kantor pertanahan akan aktif mendata tanah-tanah hak adat yang ada di Kabupaten Bengkayang khususnya Kecamatan Sanggau Ledo dan hendaknya masyarakat diharapkan ikut membantu pemerintah dalam mensukseskan prona.

⁵¹ Wawancara Bapak Suropto, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Bengkayang, 20 Februari 2002.

4.6. UPAYA-UPAYA PEMERINTAH AGAR MASYARAKAT MAU MENGKONVERSI HAK MILIK ADAT.

4.6.1 Penyuluhan.

Kantor pertanahan sudah mengadakan penyuluhan hukum Agraria di samping hukum pidana tetapi jarang sekali penyuluhan untuk hukum Agraria. Penyuluhan hukum tersebut ditujukan kepada semua masyarakat umum khususnya untuk daerah-daerah pedesaan supaya mereka tahu dan mengerti apa artinya sertifikat tanah dan cara-cara penyelenggaraan pendaftaran tanah. Isi dari pembicaraan penyuluhan hukum itu berupa:

- a. Dengan sertifikat pemegang hak atas tanah mudah untuk membuktikan status hukum tanah yang dikuasai, apakah tanah yang dikuasai merupakan tanah hak milik atau tanah dengan hak-hak yang lain.
- b. Kepastian tentang yang berhak atas tanah itu karena di dalam sertifikat sudah tercantum identitas pemilik.
- c. Peristiwa-peristiwa hukum apa yang pernah terjadi atas tanah tersebut. Di dalam sertifikat tanah dicantumkan peristiwa-peristiwa hukum yang pernah terjadi atas tanah yang dimiliki tersebut apakah karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan dan lain sebagainya.
- d. Tanah yang mana yang dihaki itu, dalam hal ini mengenai letaknya, luasnya dan batas-batasnya.

Dengan diadakan penyuluhan hukum itu aparat kantor pertanahan, berharap agar warga masyarakat yang tanahnya belum bersertifikat

segera mengkonversi hak milik adatnya supaya ada jaminan hak atas tanahnya.

4.6.2. Prona

Salah satu kendala masyarakat belum mengkonversi hak milik adatnya adalah biaya dan untuk mengatasi hal tersebut maka aparat kantor pertanahan menyelenggarakan prona. Prona yaitu kegiatan sertifikasi secara masal kepada semua warga masyarakat yang belum memiliki sertifikat hak milik atas tanahnya dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan jumlah biaya yang harus dikeluarkan menurut ketentuan yang berlaku jika ia mengurus sendiri karena proyek ini dilakukan secara massal maka biaya terasa lebih murah.

Aparat kantor pertanahan pernah menyelenggarakan prona, tetapi karena kurang kerjasama antara aparat kantor pertanahan dengan pemerintahan desa maka prona tidak dapat berjalan dengan sukses, hal ini terlihat tidak ada warga yang mengajukan permohonan konversi melalui prona. Menurut pengakuan responden biaya yang dikeluarkan adalah di atas Rp. 500.000,00 dan waktu yang dibutuhkan dari proses awal hingga dikeluarkan sertifikat kurang lebih 1 tahun.

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan penulis dari bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa hak milik adat yang ada di kecamatan Sanggau Ledo dikenal dengan nama *parene'an* (*parenekan*), *tembawang* yang berasal dari warisan nenek moyangnya yang dimiliki oleh keluarga besar atau turunannya yang dilakukan kepala adat (dalam bahasa dayak disebut *kepala binua*).

Dari 60 responden hanya ada 17 responden yang telah melaksanakan konversi (28,3 %) dan 43 responden (71,7 %) belum melaksanakan konversi hak milik adat.

Dilihat dari Peraturannya konversi hak milik atas adat sesuai dengan Undang-undang. Dimana konversi hak milik atas tanah adat diperbolehkan dengan menipisnya hak komunal dan menguatnya hak individu yang mengerjakan tanah secara intensip secara terus-menerus. Orang yang mengerjakan tanah milik adat selama 20 tahun berturut-turut mempunyai hak mengajukan permohonan hak milik atas tanah adat tersebut. Bila dilihat dari prosentasenya orang yang mengajukan permohonan konversi hak milik atas tanah adat masih sangat kecil hal ini dikarenakan ketidak mengertian masyarakat mengenai konversi itu sendiri.

Faktor penghambat konversi hak milik atas tanah adat di Kecamatan Sanggau Ledo karena sebagian warga belum mengetahui tentang adanya konversi hak

5.2. SARAN-SARAN

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan konversi hak milik adat di kecamatan Sanggau Ledo maka sebaiknya perlu dibina hubungan yang baik antara warga masyarakat dengan aparat kantor pertanahan.

5.2.1. Untuk Pemerintah

1. Perlu kiranya mengadakan penyuluhan hukum yang khusus mengenai masalah agraria, jadi penyuluhan hukum tidak hanya mengenai hukum yang umum saja dan penyuluhan ini sebaiknya diselenggarakan pada tiap-tiap desa hal ini untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum anggota masyarakat.
2. Pemerintah daerah khususnya aparat kantor pertanahan sebaiknya membuat pengumuman mengenai proses, cara, waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh anggota masyarakat sehingga masyarakat tahu dan nantinya tidak ada perbedaan pendapat lagi antara warga masyarakat dengan aparat kantor pertanahan.
3. Prona lebih sering diadakan, karena hal ini sangat membantu masyarakat Kecamatan Sanggau Ledo yang kesulitan mengenai biaya. Selain itu guna mempermudah warga sebab warga masyarakat tidak harus jauh-jauh ke kantor pertanahan yang jaraknya ratusan kilometer.

5.2.2. Untuk anggota masyarakat.

1. Anggota masyarakat diharapkan mau mengikuti penyuluhan yang disampaikan oleh pemerintah agar penyuluhan yang disampaikan oleh pemerintah agar pengetahuan mereka tentang masalah hukum pada umumnya dan hukum agraria pada khususnya akan bertambah banyak sehingga diharapkan agar warga masyarakat mampu dan dapat mengatasi masalah yang berhubungan dengan tanah yang dimilikinya.
2. Anggota masyarakat diharapkan membantu aparat kantor pertanahan bila aparat membutuhkan dan meminta data-data yang jelas dan lengkap mengenai tanah yang dimilikinya dalam rangka pelaksanaan prona sehingga terjalin kerja sama yang baik antara warga dengan aparat kantor pertanahan.

5.3. RINGKASAN.

Pesatnya pembangunan di segala bidang di Indonesia memerlukan tanah sebagai salah satu sarana, di sisi lain luas tanah tidak bertambah sehingga tanah mempunyai nilai strategis. Sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria hukum tanah di Indonesia bersifat dualistik yaitu ada hukum tanah yang tunduk pada Hukum Adat dan ada hukum tanah yang tunduk pada Hukum Barat. Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tanggal 24 September 1960, hukum agraria Indonesia menjadi unifikasi. Tujuan utama pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria yaitu untuk meletakkan dasar-dasar terbentuknya hukum agraria yang mampu membawa kebahagiaan dalam

rangka mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera. Dalam hal ini maka tanah-tanah yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria harus di konversi ke dalam salah satu hak yang ada dalam Undang-Undang Pokok Agraria dengan maksud menjamin kepastian hukum dan sebagai alat bukti yang kuat bagi yang berkepentingan.

Kenyataan dalam praktek konversi dari hak milik atas tanah adat (hak yang terkekang hak ulayat) tidak berjalan sebagaimana mestinya misalnya tanah-tanah yang berasal membuka hutan, tanah parene'an, tembawang dimana hak komunalnya sudah melemah dan dikuasai perorangan tetapi belum banyak yang dikonversi.

Gaya pemikiran seperti ini dipahami sebab masyarakat adat yang menghuni anak milik adat pada umumnya masyarakat agraris yang semata-mata hidup dari pertanian dan perternakan tradisional serta berpendidikan rendah. Mereka tidak merasakan ancaman akan kehilangan hak atas tanahnya, sehingga tidak dibutuhkan bukti-bukti formal. Bila ada perselisihan mengenai tanah, misalnya siapa pemegang hak atas tanah sebidang tanah, cukup dibuktikan alat-alat bukti setempat. Umpamanya siapa yang mengusahakannya tanah milik adat selama ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka diajukan penelitian:

1. Bagaimana keberadaan masyarakat adat di Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat.
2. Apakah konversi Hak milik atas adat sesuai dengan UUPA.
3. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan konversi hak milik atas tanah adat di Kecamatan Sanggau Ledo.

Permasalahan di atas diteliti dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan konversi hak milik atas tanah adat di Kecamatan Sanggau Ledo. Penelitian ini dilakukan supaya ada tindakan timbal balik dari kantor pertanahan dengan mengeluarkan kebijakan yang tidak merugikan kantor pertanahan dan masyarakat, memberikan keringanan, kemudahan, pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sehingga masyarakat yang belum mengkonversi hak milik atas tanah adat mau mengkonversi.

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif yang ditunjang yuridis sosiologis, dengan melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Perolehan dari kedua data tersebut untuk selanjutnya dianalisa secara normatif berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dengan melihat fakta yang terjadi dalam praktek. Selanjutnya digabungkan dengan data kepustakaan sehingga dapat diperoleh gambaran konversi hak milik atas tanah adat dan upaya pemerintah untuk mewujudkan keseimbangan antara kantor pertanahan dengan masyarakat, sehingga masyarakat mau mengkonversi hak milik atas tanah adat.

Berdasarkan data ini disimpulkan bahwa konversi hak milik atas tanah adat di Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat berjalan belum sebagaimana mestinya hal ini dikarenakan ketidaktahuan masyarakat, biaya yang mahal, rendahnya tingkat pendidikan, proses/prosedur yang berbelit-belit, jangka waktunya lama dan pengaruh hukum adat setempat sehingga banyak masyarakat belum mau mengkonversi hak milik atas tanah adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andasputra Nico, **Perlawanan Rakyat Di Hutan Kalimantan**, Institut Dayakologi, Pontianak, 1999.
- Bamba John et al, **Pelajaran Dari Masyarakat Dayak**, Institut Dayakologi, Pontianak, 2001.
- Dahl Jens et al, **Masyarakat Adat Di Dunia Eksistensi Dan Perjuangannya**, Gramedia, Jakarta, 2001.
- Djuweng Stepanus, **Konversi ILO Mengenai Bangsa Pribumi Dan Masyarakat Adat Di Negeri-Negeri Merdeka**, ELSAM, Jakarta.
- Dijk Van, **Penghantar Hukum Adat Indonesia**, Sumur, Bandung, 1979.
- Gautama Candra, **Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap Negara, Saresehan Masyarakat Adat Nusantara**, Jakarta, Maret 1999.
- Gautama Soedargo Prof, Dr, SH, **Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria**, Alumni, Bandung, 1986.
- Harsono Boedi. Prof, **Hukum Agraria Indonesia Sejarah Penyusunan Isi Dan Pelaksanaannya**, Jilid I, Djambatan, Jakarta, 1999.
- , **Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah**, Djambatan, Jakarta, 2000.
- , **Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional**, Universitas Trisakti, Jakarta, 2002.
- Hadikusuma Hilman Prof. SH, **Hukum Perekonomian Adat Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Hanitijo Soemitro Rony Prof, **Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Haar Ter, **Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat**, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- Lontaan. J.U, **Sejarah Hukum Adat Dan Adat Istiadat Kalimantan Barat**, Bumi Restu, Jakarta, 1975.

Muhammad Bushar Prof. SH, **Pokok-Pokok Hukum Adat**, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

Mertokusumo Soedikno, Prof, Dr, SH, **Hukum Perundang-Undangan Agraria**, Gadjah Mada Press, Yogyakarta, 1987.

Patebang Edi, et al, **Konflik Etnis Di Sambas**, Institut Studi Arus Informasi, 2001.

-----, **Kedaulatan Masyarakat Adat Yang Teraniaya**, Mitra Kasih, Pontianak, 2000.

Pilin Matheus et al, **Hutan Darah Dan Jiwa Dayak, Sistem Hutan Kerakyatan**, BSP-KEMALA, 1999.

Perangin Efendi, **Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum**, CV. Rajawali, Jakarta, 1986.

-----, **Praktek Permohonan Hak Atas Tanah**, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.

Parlindungan A.P. Prof, Dr, SH, **Pendaftaran Dan Konversi Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA**, Alumni, Bandung, 1985.

-----, **Konversi Hak-Hak Atas Tanah**, Mandar Maju, Bandung, 1990.

Sudiyat Imam, **Hukum Adat Seketsa Asas**, Liberty, Yogyakarta, 1987.

Saleh Wantjik.K, **Hak Anda Atas Tanah**, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1982

Singarimbun Masri , **Metode Penelitian Survey**, LP3ES, Jakarta 1989.

Sumardjono S.W. Maria, Prof, Dr, MPH, MCL, SH, **Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria**, Andi Offset, Yogyakarta, 1982.

-----, **Hukum Pertanahan Dalam Berbagai Aspek**, Bina Media, Medan, 2000.

Undang-Undang:

UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah

UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintah Desa

Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah No: 3 Tahun 1997 Peraturan pelaksana PP 24 Tahun 1997

Majalah

Kalimantan Riview, No. 51/November 1999.

Bumi Bakti Media Komunikasi Pertanian, Edisi 19 Tahun 1999.